

**RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016-2025 (Revisi)**



**Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu**

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111

Telepon/Faksimile (0451) 457623 – 429270

Tahun 2021



**RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016-2025 (Revisi)**

Disusun di: Palu, Sulawesi Tengah  
Pada Tanggal, 2021

Oleh

Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu



Ir. Jusman  
NIP. 19641231 199303 1 010

Dinilai dan Disahkan  
Pada Tanggal, 8 September 2021

Oleh

Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi,



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.  
NIP. 196804041996031004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jl. Prof. DR. Muh. Yamin, SH No. 9 (0451) 421844 – 451560 Fax. (0451) 451560  
**PALU – ( 94112 )**

Palu, 24 Mei 2021

Kepada

Nomor : 522/09.15/Bid.III  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Revisi Dokumen Rencana  
Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP)  
Taman Nasional Lore Lindu  
Tahun 2016-2025

Yth. Kepala Balai Besar  
Taman Nasional Lore Lindu

di-  
tempat.

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor S.520/IV-T.5/TK-P3/4/2021 Tanggal 22 April 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Terkait dengan Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu 2016 -2025, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

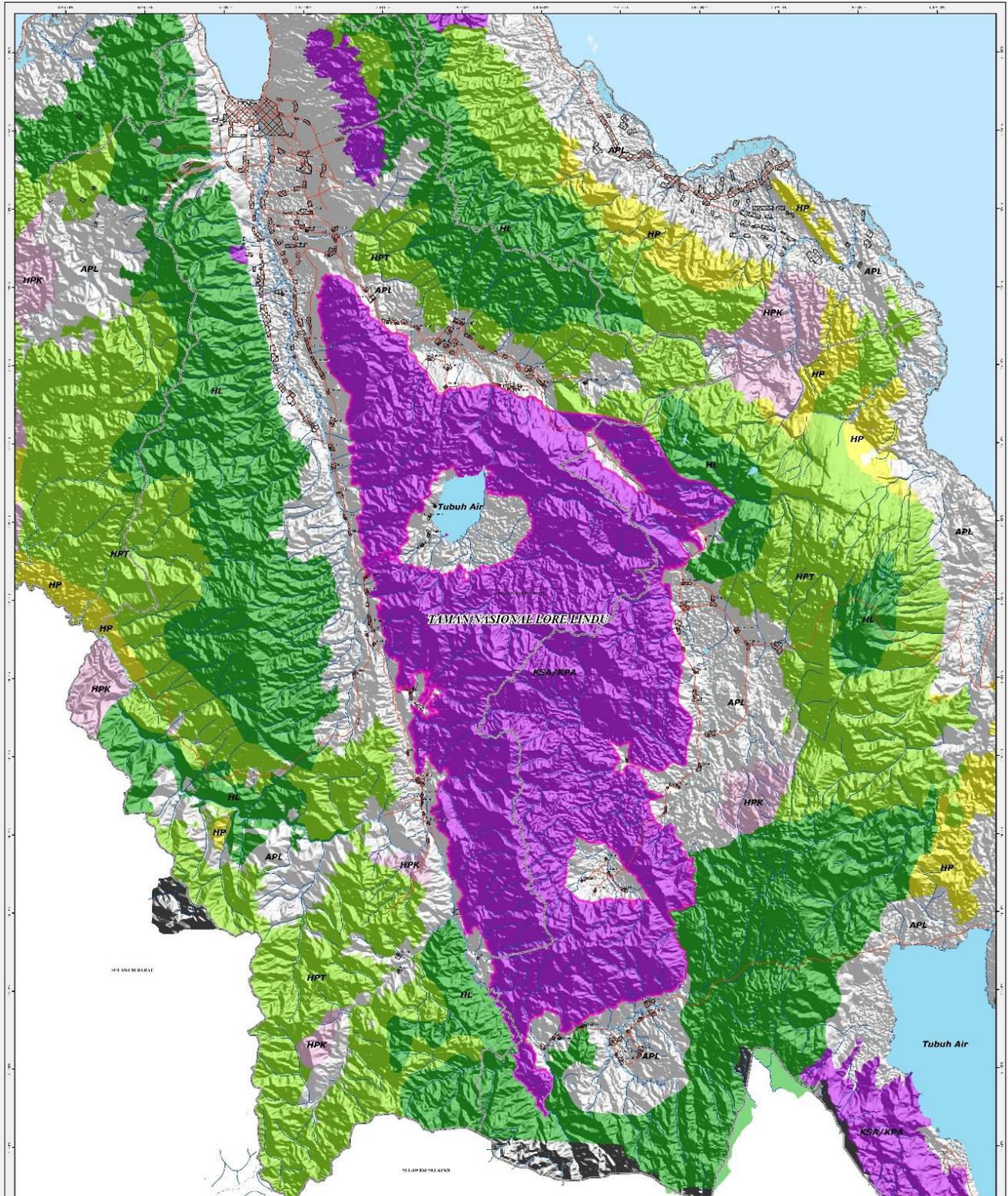
1. Kami mendukung upaya pengelolaan konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Lore Lindu, sebagaimana yang tertuang pada Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu Tahun 2016-2025 yang telah disusun;
2. Pemanfaatan potensi baik flora fauna serta ekosistem Taman Nasional Lore Lindu yang termasuk dalam kawasan lindung nasional, perlu melalui perencanaan yang terarah dan menyeluruh;
3. Berkenaan dengan poin-poin di atas, kami memberikan rekomendasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Lore Lindu Tahun 2016-2025 untuk proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PLT KEPALA BAPPEDA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,  
  
**H. M. FAIZAL MANG, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630331 199003 1 011

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.



**Keterangan**

- Jalan
- Pemukiran
- Baris Kabupaten
- Desa
- Stagaj
- APL
- HP
- HPK
- HPT
- KSA/KPA
- KSA/KPA Air
- Tubuh Air

KUMBERANGAN LINGKARAN HIMPUNAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOWISATA  
BALAI HSAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU

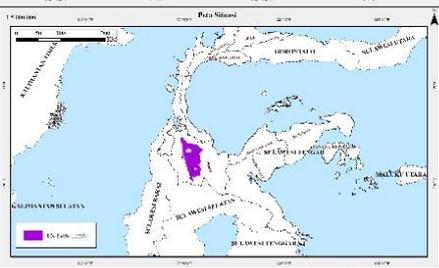
Sumber data:  
1. Foto Udara Dum Indonezia Skala : 1:50.000 (BAKOSURTANAL)  
2. Atlas Topografi tahun 1920/4 tentang kecamatan Irtan dan Konservasi Perairan (Pernis)  
Indonezia : Irtan  
3. SK : 296/SK/DA/SR/PTCSA/RT/2018 tentang Zona Pengabdian  
Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah  
4. Nomor Peta No. 13.02.00.0005.05 (Garis 2018) No. 431 D 1 C 1 (TM/43)  
5. 348117 : 541000002236  
6. Data DSDS Tahun 2018  
7. Hasil Pengumpulan Data di Lapangan

**PETA SITUASI  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN POSO  
LUAS = 215.733,7 HA**



1:200,000

Sistem Koordinat Geografis : GCS WGS 1984  
Datum : D 2011 1984 Time Standard : Greenwich  
Angkut 1 mtr : Degree Minute Second





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan salah satu kawasan penting di region wallacea. Penetapan sebagai kawasan konservasi dilandasi oleh nilai-nilai penting sebagai perlindungan satwa endemik, pengaturan tata air, nilai budaya dan sejarah, perwakilan ekosistem hutan hujan pegunungan sulawesi, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, dan kekompakan lanskap. Kondisi pengelolaan kawasan TNLL saat ini menghadapi beberapa tantangan dan kendala seperti penurunan jumlah populasi flora fauna, gangguan terhadap flora fauna, *zoonosis*, terganggunya ekosistem asli dan DAS, batas kawasan, perambahan, *base line* data Kehati, tersosialisasinya peraturan perundangan, keterlibatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, keterbatasan riset, koordinasi dan kerjasama dengan para pihak, PNPB, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana dan kolaborasi dengan para pihak. Pengelolaan kawasan TNLL tidak lepas dari beberapa isu-isu penting yang menjadi fokus pengelolaan seperti usulan hutan adat, kebutuhan energi terbarukan, kemitraan konservasi, Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan peluang *carbon trade*.

Dari kondisi saat ini dan memperhatikan isu-isu strategis, maka kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang akan diwujudkan melalui pengelolaan 10 tahun ke depan adalah terjaganya eksistensi kawasan hutan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya untuk memenuhi peran dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan; terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem terestrial khas Sulawesi sebagai bagian ekosistem wallacea; terjaganya kelangsungan proses-proses ekologi dalam kawasan TNLL yang mendukung sistem penyangga kehidupan dengan penyelarasan pada program pembangunan masyarakat di dalam/di sekitar kawasan TNLL; terlaksankannya kegiatan pengelolaan lestari berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumber daya alam /keanekaragaman hayati dan sebagai bentuk solusi permasalahan pengelolaan kawasan konservasi dan solusi permasalahan masyarakat



yang ada di dalam/disekitar kawasan TNLL; terwujudnya dukungan kegiatan pendidikan dan penelitian; terjaganya kelangsungan pemanfaatan potensi sumber daya alam/keanekaragaman hayati kawasan TNLL dan sekitarnya, khususnya bagi kepentingan masyarakat setempat tanpa mengganggu kelestariannya; terwujudnya pengembangan potensi sumber daya alam/keanekaragaman hayati beserta keindahan dan keunikan ekosistem alam serta sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat di sekitarnya yang tidak saja mampu meningkatkan keberhasilan program kepariwisataan di kawasan ini, tetapi juga mampu meningkatkan sumber penghasilan masyarakat setempat sebagai alternatif pendapatan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam 10 tahun kedepan, disusunlah visi, misi, dan tujuan pengelolaan TNLL. Visi Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu adalah "Terwujudnya sistem penyangga kehidupan dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian dari ekosistem terrestrial Wallacea untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat". Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi pengelolaan TNLL sebagai berikut: 1) Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea; 2) Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; 3) Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya alam, dan 4) Mewujudkan pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pengelolaan TNLL adalah: 1) Terjaganya eksistensi kawasan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat; 2) Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL; 3) Terwujudnya pengembangan potensi jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4) Terlaksanakannya kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung pengelolaan TNLL;



dan 5) Terwujudnya pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Dalam rangka merespon dinamika yang dijelaskan di atas, maka Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu menyusun dokumen-dokumen pendukung pengelolaan TNLL yang terdiri dari: *Masterplan* (Rencana Induk) Ekowisata dan DED Pilot Ekowisata TNLL (2018), Revisi Zonasi TNLL (2018), Rencana Pemulihan Ekosistem Tahun 2020 – 2024 (2020) dan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TNLL Tahun 2021 – 2025 (2020). Telah disusunnya dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan dilaksanakannya revisi terhadap Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu tahun 2016 - 2025.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan revisi parsial dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) tahun 2016-2025 dapat diselesaikan. Revisi dokumen RPJP ini dilatarbelakangi oleh telah disusunnya beberapa dokumen terkait pengelolaan kawasan TNLL. Antara lain: *Masterplan* (Rencana Induk) Ekowisata dan DED Pilot Ekowisata TNLL, Zonasi TNLL, Rencana Pemulihan Ekosistem Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TNLL Tahun 2021 – 2025.

Dokumen revisi RPJP ini berisi pokok maksud, tujuan, dan rencana-rencana pengelolaan jangka panjang yang disusun melalui analisis keberlanjutan pengelolaan kawasan TNLL dan pemanfaatan potensi sumber daya alam kawasan TNLL dan sekitarnya. Selain itu, disajikan informasi kondisi kawasan terkini, visi-misi pengelolaan kawasan TNLL, dan rencana-rencana kegiatan pengelolaan kawasan, pembinaan-pengawasan-pengendalian, serta rencana-rencana pemantauan-evaluasi.

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan dokumen RPJP TNLL ini disampaikan banyak terima kasih. Harapan kami, semoga Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu Periode 2016 - 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi TNLL ke depan.

Palu, 2021

Kepala Balai Besar,

**Ir. Jusman**

NIP.19641231 199303 1 010



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
LEMBAR REKOMENDASI.....	iii
PETA SITUASI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. INFORMASI UMUM .....	1
1. Kelembagaan .....	1
2. Letak, Luas, dan Batas .....	2
3. Sejarah Kawasan.....	3
4. Aksesibilitas .....	7
5. Kondisi Fisik.....	8
6. Potensi Hayati.....	14
7. Potensi Wisata .....	20
B. KONDISI SAAT INI.....	27
1. Nilai Penting TNLL .....	27
2. Kondisi dan Status Kawasan .....	32
3. Isu-Isu Strategis Terkait Kawasan.....	38
4. Kondisi yang Diinginkan .....	43
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGELOLAAN.....	46
A. VISI .....	46
B. MISI.....	47
C. TUJUAN.....	47
III. ZONASI TAMAN NASIONAL LORE LINDU.....	51
A. ZONA INTI.....	52
B. ZONA RIMBA .....	53
C. ZONA PEMANFAATAN.....	55
D. ZONA REHABILITASI .....	57
E. ZONA TRADISIONAL .....	59
F. ZONA KHUSUS.....	63
IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI.....	67
V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	80
A. PEMANTAUAN.....	81
B. EVALUASI .....	81
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENGELOLAAN TNLL ...	83
LAMPIRAN .....	87



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Kawasan TNLL .....	4
<b>Tabel 2.</b> Tabel jarak tempuh berbagai lokasi di TNLL.....	8
<b>Tabel 3.</b> Potensi Wisata di Taman Nasional Lore Lindu.....	20
<b>Tabel 4.</b> Paket Wisata yang ditawarkan di TNLL .....	21
<b>Tabel 5.</b> Nilai Penting TNLL yang menjadi fitur target konservasi.....	27
<b>Tabel 6.</b> Hasil monitoring satwa prioritas TNLL tahun 2013 - 2019 .....	35
<b>Tabel 7.</b> Usulan Hutan Adat di TNLL .....	38
<b>Tabel 8.</b> Penyesuaian antara pengelolaan ruang wilayah adat dengan revisi zonasi TNLL 2018 .....	39
<b>Tabel 9.</b> Desa Penyangga di Taman Nasional Lore Lindu.....	61
<b>Tabel 10.</b> Proyeksi Tingkat Keberlanjutan Sepuluh Tahun Mendatang...	68
<b>Tabel 11.</b> Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan TNLL.....	69
<b>Tabel 12.</b> Hasil Evaluasi Tujuan Pengelolaan pada Tahun ke-5.....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BBTNLL .....	1
Gambar 2. Aksesibilitas di sekitar TNLL .....	7
Gambar 3. Peta usulan hutan adat di TNLL .....	39
Gambar 4. Zonasi Taman Nasional Lore Lindu 2015 dan 2018 .....	51
Gambar 5. Zona Inti Taman Nasional Lore Lindu .....	52
Gambar 6. Zona Rimba Taman Nasional Lore Lindu .....	54
Gambar 7. Zona Pemanfaatan Taman Nasional Lore Lindu .....	56
Gambar 8. Zona Rehabilitasi Taman Nasional Lore Lindu.....	58
Gambar 9. Peta Zona Tradisional Taman Nasional Lore Lindu.....	60
Gambar 10. Peta Zona Khusus Taman Nasional Lore Lindu .....	63
Gambar 11. Analisis Monte Carlo tentang Kestabilan Program pada Aspek Prioritas .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penunjukan Taman Nasional Lore Lindu .....	89
Lampiran 2. Keputusan Menteri Kehutanan RI No.: SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah .....	92
Lampiran 3. Surat RPJP Taman Nasional Lore Lindu .....	98
Lampiran 4. Evaluasi Dokumen RPJP .....	102
Lampiran 5. SK Tim Kerja Penyusunan Revisi Dokumen RPJP TNLL .....	103
Lampiran 6. Berita Acara Konsultasi Publik .....	105
Lampiran 7. Surat Permohonan Rekomendasi Bappeda .....	106
Lampiran 8. Peta Zonasi Taman Nasional Lore Lindu .....	107
Lampiran 9. Peta Daerah penyangga Taman Nasional Lore Lindu .....	108
Lampiran 10. Peta Nilai Penting Kawasan Taman Nasional Lore Lindu ...	109
Lampiran 11. Peta Tutupan lahan Taman Nasional Lore Lindu .....	110
Lampiran 12. Peta Wilayah Kerja .....	111
Lampiran 13. Peta Kerawanan Kebakaran Hutan .....	112
Lampiran 14. Peta DAS .....	113

## I. PENDAHULUAN

# RPJP

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
TAHUN 2016-2025

Danau Tambing



### Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile  
(0451) 457623 – 429270

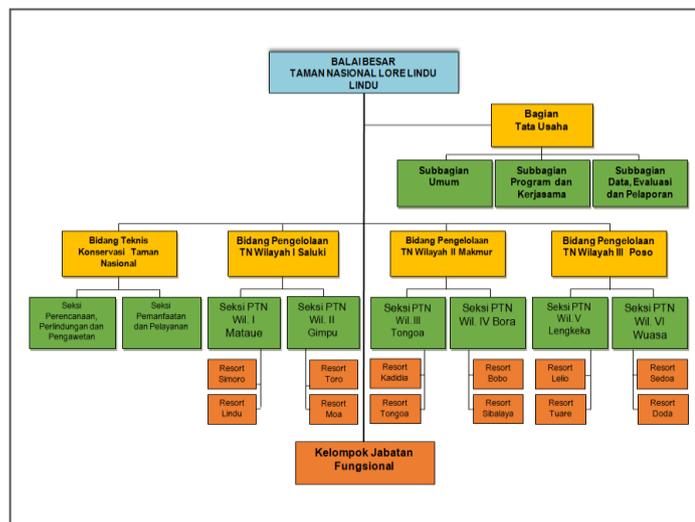


## I. PENDAHULUAN

### A. INFORMASI UMUM

#### 1. Kelembagaan

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu merupakan balai besar taman nasional dengan klasifikasi UPT Kelas I dengan Tipe A. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang terdiri 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) dan 6 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Kepala Balai Besar TNLL dibantu oleh 5 pejabat Eselon III/Administratur (Kepala Bagian Tata Usaha; Kepala Bidang Teknis Konservasi; Kepala Bidang PTN Wilayah I, II & III) dan 11 pejabat Eselon IV/Pengawas (Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama; Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Ke rjasama; Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan; Kepala Sub Bagian Umum; Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan; Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan; serta Kepala Seksi PTN Wilayah I, II, III, IV, V & VI). Selain itu ada Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, dan Fungsional Umum.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi BBTNLL



Komposisi pegawai (PNS) BBTN Lore Lindu berdasarkan pendidikan formal adalah 1 orang jenjang SLTP, 23 orang jenjang SMA/SMK, 3 orang jenjang diploma tiga, 43 orang jenjang sarjana (S1)/D4, dan 10 orang jenjang master (S2). Berdasarkan kepangkatan, 1 orang Golongan Satu, 26 orang Golongan Dua, 48 Golongan Tiga, dan 6 orang Golongan Empat. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Struktural 17 orang, Fungsional Umum 16 orang, Fungsional Polhut 17 orang, Fungsional PEH 18 orang, Fungsional Penyuluh 9 orang, arsiparis 1 orang, Pranata Komputer 1 orang dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1 orang.

## **2. Letak, Luas, dan Batas**

TNLL terletak sekitar 20 km arah tenggara dari Kota Palu. Secara Geografis, TNLL yang dideklarasikan pada tahun 1993 terletak antara  $119^{\circ} 58' - 120^{\circ} 16'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ} 08' - 1^{\circ} 03'$  Lintang Selatan. Secara administratif Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) berada dalam 2 dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi (meliputi wilayah kecamatan Palolo, Nokilalaki, Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Tanambulava, Gumbasa dan Sigi Biromaru) dan Kabupaten Poso (meliputi wilayah kecamatan Lore Utara, Lore Piore, Lore Tengah, dan Lore Barat) Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengelolaannya areal ini telah dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang berkedudukan di kota Palu. Pada bagian utara TNLL berbatasan dengan Dataran Lembah Palu dan Dataran Lembah Palolo, sebelah timur berbatasan dengan Dataran Lembah Napu, sebelah selatan dengan Dataran Lembah Bada, dan sebelah barat dengan Sungai Lariang dan Dataran Lembah Kulawi.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.593/Kpts-II/1993, luas TNLL kurang lebih 229.000 Ha. Penunjukan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan tata batas definitif hingga temu gelang tahun 1997 dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Keputusan No.464/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999 dengan luas kawasan 217.991.18 ha atau (sekitar 1,2% wilayah Sulawesi yang luasnya 189.000 km<sup>2</sup> atau 2,4% dari sisa hutan Sulawesi yakni 90.000 km<sup>2</sup>). Perbedaan



luasan ini disebabkan dengan terbentuknya 2 (dua) daerah *enclave*, yaitu Lindu dan Besoa. Luas kedua areal *enclave* adalah 18.178 ha dengan perincian luas Danau Lindu 13.093 ha dan Besoa 5.085 ha. Dengan terbitnya SK Menhut Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah maka adanya *enclave* Dongi-Dongi, perubahan Zona Khusus Katu menjadi *enclave* Katu dan beberapa wilayah lainnya sehingga luas kawasan TNLL kini menjadi 215.733,70 Ha.

### 3. Sejarah Kawasan

TNLL dibatasi oleh lembah-lembah yang dihuni oleh masyarakat agraris baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang. Selain dua lembah dataran tinggi yang telah ditetapkan sebagai kawasan *enclave*, tidak ada daerah pemukiman tetap yang lain di dalam kawasan TNLL.

TNLL merupakan komponen yang penting dalam pengembangan daerah Sulawesi Tengah. Fungsinya sebagai areal konservasi flora dan fauna endemik Sulawesi adalah bagian dari strategi konservasi Indonesia. Disamping itu, TNLL memberikan andil bagi Sulawesi Tengah dalam hal melindungi daerah aliran sungai bagi bendungan irigasi Gumbasa, penyediaan air bagi daerah penghasil beras, perlindungan sumber air bagi Danau Lindu dan kelangsungan produksi ikan di danau tersebut, daerah tujuan wisata, sebagai lokasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan bisa menjadi sumber pendapatan baik bagi pemerintah daerah maupun penduduk di sekelilingnya.

Sejarah Kawasan TNLL dijelaskan pada Tabel 1 di bawah



Tabel 1. Sejarah Kawasan TNLL

No	Status Kawasan	Status Pengelolaan	Dasar Pertimbangan
1	Suaka Margasatwa Lore Kalamanta; SK. Menteri Pertanian No.522/Kpts/Um/10/1973 tanggal 20 Oktober 1973 tentang Penunjukan Areal Hutan Biru, Kalamanta dan Lore seluas <b>131.000 Ha</b> di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Suaka Margasatwa	Seksi PPA Sulawesi Tengah Dinas Kehutanan Dati I Provinsi Sulawesi Tengah	Areal Hutan Biru, Kalamanta dan Lore adalah habitat binatang liar yang dilindungi, jenis Anoa ( <i>Anoa depressicornis</i> ), Rusa ( <i>cervus</i> ), Kera Hitam Sulawesi ( <i>Cynopithacus niger</i> ) dan Babirusa ( <i>babirusa</i> )
2	Hutan Wisata / Hutan Lindung Danau Lindu; SK. Menteri Pertanian No.46/Kpts/Um/1/1978 tanggal 25 Januari 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Danau Lindu dan sekitarnya seluas <b>31.000 Ha</b> yang terletak di Daerah Tk.II Donggala, Daerah Tk. I Sulawesi Tengah yang letaknya bergandengan dengan Suaka Margasatwa Lore Kalamanta sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Hutan Wisata dan Hutan Lindung	Seksi PPA Sulawesi Tengah Dinas Kehutanan Dati I Provinsi Sulawesi Tengah  Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam Lore Kalamanta Tanjung Api dsk – Balai Konservasi Sumber Daya Alam VI di Palu;  SK. Menteri Pertanian No.429/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juli 1978	Memiliki keindahan panorama yang sangat menarik dan mempunyai arti penting, ditinjau dari segi pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi sehingga areal hutan tersebut perlu dibina kelestariannya untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan kepariwisataan maupun bagi perlindungan hutan
3	Suaka Margasatwa Lore Lindu; SK. Menteri Pertanian No.1012/Kpts/Um/12/1981 tanggal 10 Desember 1981 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sungai Sopo – Sungai Gumbasa seluas <b>67.000 Ha</b> yang terletak di Daerah Tk.II Donggala dan Daerah Tk.II Poso, Daerah Tk.I Sulawesi Tengah sebagai Suaka Margasatwa		Sulawesi ( <i>Cynopithacus niger</i> ) sedangkan areal hutan tersebut perlu dibina kelestariannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan
4	Calon Taman Nasional Lore Lindu; Pernyataan Menteri Pertanian SK.No.736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang Calon – Calon Taman Nasional; Penggabungan SM Lore Kalamanta, HW/HL Danau		Bertepatan dengan diselenggarakannya Kongres Taman Nasional Sedunia ke III di Bali yang terdiri dari: 1. TN Kerinci Seblat 2. TN Barisan Selatan 3. TN Kepulauan Seribu



No	Status Kawasan	Status Pengelolaan	Dasar Pertimbangan
	Lindu dan SM Lore Lindu; luas <b>231.000 Ha</b>		4. TN Bromo Tengger Semeru 5. TN Meru Betiri 6. TN Bali Barat 7. TN Tanjung Putting 8. TN Kutai <b>9. TN Lore Lindu</b> 10. TN Dumoga Bone 11. TN Manusela, Wai Nua / Wai Mua
5	Penunjukan Taman Nasional Lore Lindu; SK. Menteri Kehutanan No.593/Kpts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 tentang Perubahan Fungsi Hutan Wisata / Hutan Lindung Danau Lindu yang terletak di Kabupaten Daerah Tk.II Donggala dan Suaka Margasatwa Lore Lindu serta Suaka Margasatwa Lore Kalamanta terletak di Kabupaten Daerah Tk.II Donggala dan Kabupaten Daerah Tk.II Poso, Propinsi Daerah Tk.II Donggala, Propinsi Daerah Tk.I Sulawesi Tengah seluas <b>229.000 Ha</b>	Proyek Pembinaan Taman Nasional Lore Lindu – Balai Konservasi Sumber Daya Alam VI di Palu (1993 - 1997)  Unit Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (UPT Ditjen PHPA);  SK. Menteri Kehutanan No.185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997	1. Hutan Wisata / Hutan Lindung Danau Lindu, Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dan Suaka Margasatwa Lore Lindu yang letaknya saling berbatasan tersebut memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, khususnya satwa yang dilindungi seperti Anoa, Rusa, Kera Hitam Sulawesi dan Babirusa 2. Perlu dipertahankan dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan serta untuk menunjang rekreasi dan pariwisata
6	Penetapan Taman Nasional Lore Lindu; SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.464/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Lindu seluas <b>217.991,18 Ha</b> di Kabupaten Daerah Tk.II Donggala dan Poso Propinsi Daerah Tk.I Sulawesi Tengah Sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Taman Nasional;	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (2002); SK. Menteri Kehutanan No.6186/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Tata Kerja Balai Taman Nasional  Kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu diresmikan di Palu tanggal 17 Februari 2005  Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (2007);	1. Adanya Keputusan Menteri Pertanian No.050/Kpts-VII/1987 tanggal 25 Februari 1987 telah ditunjuk areal hutan yang terletak di Kabupaten daerah Tk.II Donggala dan Poso Propinsi Daerah Tk.I Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan. 2. Kelompok Hutan Lore Lindu telah ditata batas temu gelang oleh Panitia Tata Batas Hutan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Tengah No.188/44/5040/Kanwilhut/1990 tanggal 18 Oktober 1990 dengan luas 217.991,18 Ha dan telah dibuat serta ditandatangani Berita Acara Tata

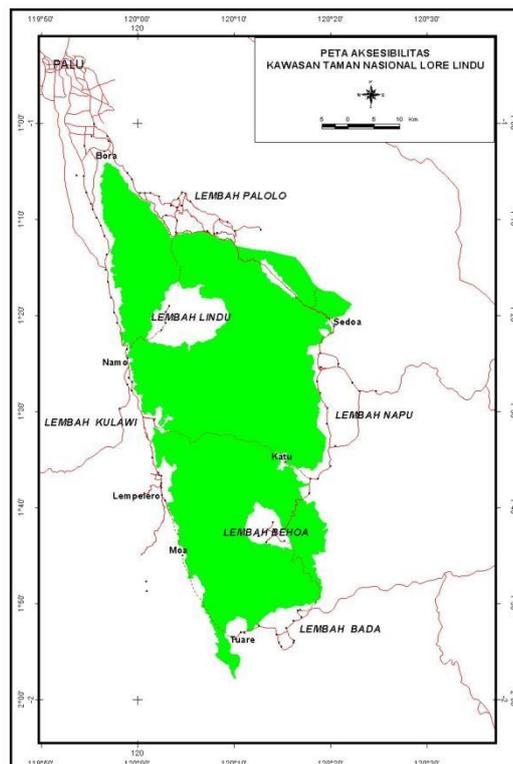


No	Status Kawasan	Status Pengelolaan	Dasar Pertimbangan
		Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional	Batas berikut Petanya oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tk.II Donggala dan Poso Provinsi Daerah Tk.I Sulawesi Tengah (tanggal 17 Maret 1995 dan 28 Maret 1995)
7	Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah; Luas 215.733 Ha (Perhitungan Digital)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial</li> <li>2. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditetapkan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 Ha</li> <li>b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 42.788 Ha</li> <li>c. Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 Ha</li> </ol> </li> <li>3. Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan</li> </ol>



#### 4. Aksesibilitas

Kawasan TNLL secara umum dikelilingi dengan pemukiman masyarakat dan dukungan aksesibilitas jalan yang memadai. TNLL merupakan salah satu taman nasional yang hampir seluruh wilayahnya dapat diakses dengan kendaraan roda 4 kecuali di bagian barat daya yang menghubungkan antara Desa Lempelero di Kec. Kulawi Selatan dan Desa Tuare di Kec. Lore Barat. Jalan yang menghubungkan antara Desa Namo dan desa-desa yang ada di Kec. Lindu juga sering putus karena tanah longsor yang umum terjadi pada musim hujan. Akses terdekat menuju kawasan dari Kota Palu berada di Desa Bora, masuk dalam wilayah pengelolaan BPTNW II Makmur, dengan jarak  $\pm 20$  km dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 selama  $\pm 30$  menit. Jarak terjauh berada di Desa Tuare, masuk dalam wilayah pengelolaan BPTNW III Poso, dengan jarak  $\pm 380$  km melewati kota Poso dan dapat ditempuh dalam waktu  $\pm 7$  jam. Lembah Behoa merupakan *enclave* yang berada di tengah kawasan TNLL, yang berjarak  $\pm 160$  km dan dapat ditempuh dalam waktu  $\pm 5$  jam. Gambaran akses selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Aksesibilitas di sekitar TNLL



**Tabel 2.** Tabel jarak tempuh berbagai lokasi di TNLL

Jarak Tempuh Palu- Lembah Bada

Jarak (km)	Palu	Poso	Tentena	Bada
Palu	0	220	276	336
Poso	220	0	56	116
Tentena	276	56	0	60
Bada	336	116	60	0

Jarak tempuh Palu-Gimpu

Jarak (km)	Palu	Saluki	Sidaunta	Lindu	Mataue	Gimpu
Palu	0	50	62	79	71	105
Saluki	50	0	12	29	21	55
Sidaunta	62	12	0	17	9	43
Lindu	79	29	17	0	26	60
Mataue	71	21	9	26	0	34
Gimpu	105	55	43	60	34	0

Keterangan: Dari Palu jalan menuju Lindu berbelok kekiri di Sidaunta

Jarak tempuh Palu-Behoa

Jarak (km)	Palu	Bora	Kadidia	Kamarora	Tambing	Doda
Palu	0	20	58	61	80	157
Bora	20	0	38	41	60	137
Kadidia	58	38	0	3	22	99
Kamaror	61	41	3	0	19	96
Tambing	80	60	22	19	0	77
Doda	157	137	9	96	77	0

## 5. Kondisi Fisik

### Topografi dan Fisiografi

TNLL sebagian besar terdiri atas hutan pegunungan dan subpegunungan ( $\pm 90\%$ ) serta sebagian kecil hutan dataran rendah ( $\pm 10\%$ ). Titik terendah di TNLL terletak dekat ujung barat laut yang ketinggiannya sekitar 200 m dpl. Titik tertinggi adalah puncak Gunung Rorekatimbu (2610 m dpl) yang berada di batas TNLL bagian timur.

Topografi di kawasan TNLL sangat bervariasi dan tidak beraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini terletak sangat dekat dengan jalur benturan dari dua dataran. Tepian pegunungan umumnya teratur dan paralel, namun daerah ini cenderung tidak beraturan ke segala arah. Puncak-puncak tertinggi pada TNLL terletak di sebelah utara. Gunung Nokilalaki pada ketinggian 2.357 m dpl mewakili puncak tertinggi di TNLL.



Bersebelahan dengan itu, daerah pegunungan yang sama – Gunung Rorekatimbu – sedikit lebih tinggi dengan ketinggian 2.610 m dpl walaupun puncaknya terletak di luar batas TNLL. Puncak-puncak dan punggung-punggung gunung tinggi lainnya memiliki ketinggian di atas 2.000 m dpl. Termasuk di dalamnya wilayah kompleks Tokosa (2.230, 2.276, 2.130 dan 2.126 m dpl), Molalowa (2.192 dan 2.145 m dpl) Wantua (2.002 m dpl), Latawangu (2.023 dan 2.270 m dpl), Sombua (2.008 m dpl) dan Torenali (2.360 dan 2.210 m dpl). Selain dari itu, terdapat banyak puncak yang lebih rendah yang memiliki ketinggian antara 1.000 sampai dengan 2.000 m dpl.

Berdasarkan bentuk topografinya, TNLL memiliki 8 (delapan) kelompok area yang khas sebagai berikut:

1. Lembah Napu: Merupakan sebuah lembah yang besar dengan ketinggian antara 1.100-1.300 m dpl. Lembah ini terletak pada bagian timur TNLL. Dasar lembah bergelombang, tanah aluvial, dan dilalui oleh Sungai Lariang.
2. Lembah Besoa: Lembah Besoa terletak pada ketinggian sekitar 1.200 m dpl. Bentuk topografi umumnya datar dengan tanah *lacustrine*.
3. Lembah Bada: Merupakan sebuah lembah yang terletak di sebelah selatan wilayah Lore Lindu pada ketinggian antara 760-1.060 m dpl.
4. Lembah Kulawi: Lembah yang panjang dan sangat sempit ini terletak di sepanjang patahan Palu Koro. Memiliki ketinggian bervariasi antara 407-812 m dpl.
5. *Enclave* Lindu: Merupakan sebuah dataran dari deposisi *lacustrine* di sekitar Danau Lindu. Lereng dari *enclave* Lindu terbentang dari barat ke timur dan terletak pada ketinggian antara 975-1.025 m dpl. Luas dari sedimentasi menunjukkan bahwa pada masa lampau badan air Danau Lindu lebih besar ukurannya daripada saat ini. Wilayah-wilayah di bagian Timur dan Barat dari Danau naik secara tajam pada ketinggian sekitar 1.300 m dpl.



6. Lembah Palolo: Lembah ini terletak pada ketinggian antara 540-750m dpl. Pusat dari lembah ini sedikit bergelombang sementara sisi-sisinya sangat curam.
7. Desa Pakuli: Desa ini secara struktur merupakan bagian dari Desa Kulawi terletak hanya pada ketinggian 48-140 m dpl. Daerah ini merupakan wilayah yang padat penghuninya dan secara intensif mengusahakan pertanian dengan irigasi.
8. Wilayah Sebelah Timur Kulawi: Wilayah ini merupakan daerah yang jarang penduduknya dan terletak pada bagian akhir dari lembah Kulawi serta berada pada ketinggian lebih dari 600 m dpl.

Wilayah dataran tinggi TNLL sebagian besar terdiri dari hutan pegunungan yang terjal, berlipat, diselingi dengan banyaknya lembah sungai dan membentuk sebuah pola drainase tak beraturan yang kompleks serta ujung dari TNLL ini berbatasan dengan sungai utama. TNLL diikat oleh tiga ciri utama:

- 1) Patahan Palu Koro: Merupakan patahan yang terletak sebelah barat TN bersifat komposit. Di dalamnya termasuk patahan Fossa Sarasina, menetapkan tiga jalan lembah sungai yang menandai ujung panjang sebelah barat TNLL, yaitu Sungai Palu yang mengalir ke barat laut, Sungai Haluo yang mengalir ke barat daya, Sungai Lariang yang mengalir ke barat laut. Pada umumnya, batas TNLL berjalan paralel dengan sungai-sungai di atas pada jarak 1 sampai 5 km.
- 2) Patahan Dorongan Poso: Dorongan Poso mempengaruhi topografi yang dekat dengan TNLL. Patahan ini terletak sebelah Timur taman nasional, Sedoa dan Lelio, terletak kira-kira sejajar pada jarak antara 5-15 km. Patahan besar Tawaelia ini adalah sebuah ciri yang menerangkan aliran Sungai Lariang karena melewati bagian yang lebih rendah dari sebelah utara TNLL.
- 3) Lembah Palolo-Sopu: Lembah-lembah sungai ini mengikat TNLL sepanjang ujung bagian utaranya. Wilayah ini merupakan salah satu daerah pertanian utama yang bersebelahan dengan TNLL.



### Geologi dan Tanah

Sistem-sistem perbukitan dan pegunungan dari Lore Lindu kebanyakan terdiri dari batu-batuan granit, terbentuk dari pelapukan akibat cuaca. Sistem-sistem Telawi (pegunungan) dan Bukit Baringan merupakan sumber dari 77% wilayah TNLL. Keduanya memiliki *Tropudults* sebagai salah satu dari dua tipe tanah dominan dan *Dystropepts* sebagai tanah campuran. Tipe tanah ini berbeda dalam hal jumlah atau perbandingannya terhadap jenis tanah yang kedua.

*Tropudults* merupakan salah satu dari *Ultisols* yang paling umum (terbentuk karena cuaca dengan sebuah horizon *argillic* dari tanah lempung yang tidak jenuh) biasanya akibat pencucian pada wilayah yang berdrainase baik. Wilayah-wilayah perbukitan memiliki kondisi-kondisi kelembaban dan panas yang tinggi. Jenis-jenis ini merupakan tanah sangat masam dan dikelompokkan sebagai tanah alluvial coklat sampai merah. Umumnya jenis tanah ini miskin hara sehingga kurang sesuai untuk pertanian.

Tanah dominan lain pada sistem Telawi adalah *Troporthents* yang merupakan bagian dari susunan tanah *Entisols*. *Entisols* adalah tanah muda yang belum berkembang dimana pembentukan tanahnya seimbang dengan erosi yang terjadi biasanya ditemukan pada daerah pantai. Karena itu, asosiasi yang dekat dengan sistem pegunungan TWI pada Lore Lindu adalah hal yang luar biasa.

Baringan memiliki tipe dominan tanah yang dikenal sebagai *Haplorthox* yang merupakan salah satu dari *Oxisols* (tanah yang terbentuk oleh iklim dari permukaan tanah tua pada wilayah-wilayah tropis dan subtropis). Umumnya ditemukan pada bentuk lahan yang stabil. Silica dengan besi atau aluminium terurai dalam proses yang dinamakan ferralitisasi (lateritisasi). Tanah asam merah ke coklat ini dianggap tidak sesuai untuk pertanian.

Jenis-jenis *land system* yang membentuk TNLL, adalah:

- 1) Dataran-dataran Aluvial (8.686 ha, 3%): Danau Lindu (DLU).
- 2) Fan dan Lahar (927 ha, 1%): Kototinggi (KTT), Salo Saluwau (SSU).



- 3) Perbukitan (44.380 ha, 20%): Bukit Baringin (BBR), Batang Anai (BGA), Salo Marana (SMA).
- 4) Pegunungan (164.195 ha, 76%): Bukit Balang (BBG), Telawi (TWI), Bukit Pandan (BPD) dan Pendreh (PDH).

### *Iklm dan Hidrologi*

Sekitar 90% dari wilayah TNLL berada di atas 1000 m dpl (di atas permukaan laut) dan di wilayah dataran tinggi seperti ini suhu maksimum dan minimum hariannya sangat bervariasi. Suhu maksimum berada pada kisaran 26 hingga 35°C, sedangkan suhu minimumnya berada pada kisaran 12 hingga 17°C. Kelembaban secara umum berkisar di antara 77-85% dengan nilai minimum yang sangat signifikan yaitu 70-75% di lembah Napu. Sebagian besar dataran tinggi Sulawesi Tengah berkelembaban tinggi. Curah hujan di sekitar TNLL bervariasi dan tidak merata sepanjang tahun.

Secara umum rata-rata curah hujan tahunan di TNLL berada di atas 3.000 mm. Bahkan pada bulan-bulan yang dianggap kering, terutama di wilayah dengan ketinggian 1000 m atau lebih, curah hujan biasanya melampaui 60 mm/bulan.

Dari aspek hidrologi, wilayah TNLL merupakan areal yang sangat penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah karena arealnya merupakan daerah tangkapan hujan bagi dua sungai besar, yakni sungai Gumbasa di bagian utara yang bergabung dengan sungai Palu dibagian barat serta Sungai Lariang di bagian timur dan selatan serta sebagian bagian barat. Kedua sungai ini mempunyai tipe aliran dendritik. Pola dendritik bervariasi di dalam TNLL dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti topografi dan geologi serta sungai kecil mengalir melintasi punggung-punggung pegunungan yang tersusun dari batu granit yang menghasilkan pola berbeda dari sungai-sungai yang mengalir pada bagian lebih datar yang kaya akan deposit tanah alluvial.

Sungai Lariang terdiri dari sekitar 58 daerah sub-DAS dalam TNLL. Sungai Lariang membentuk formasi U dan menyusuri TNLL sepanjang



sekitar 245 km. Wilayah DAS Lariang sebagian besar terletak di luar TNLL. Hulu paling utara dan timur dari wilayah DAS ini berada dalam wilayah TNLL dekat desa Sedoa, kemudian aliran utama mengalir ke selatan menuju barat daya di sekitar ujung yang lebih rendah dari pada TNLL di dekat desa Tuare. Sungai Lariang kemudian membelok ke arah barat dan mengikuti patahan Palu Koro sampai ke Lempelero, dimana Sungai Lariang bertemu dengan Sungai Haluo yang mengalir ke arah selatan. Pertemuan kedua sungai berubah alirannya ke arah barat ke Kabupaten Pasang Kayu Propinsi Sulawesi Barat dan bermuara ke Selat Makassar. Walaupun tidak seekonomis dan sepenting sungai Gumbasa, Sungai Lariang ini mendukung kegiatan pertanian pada beberapa pemukiman penduduk seperti di daerah Torire, Lelio, Kolori, Pada, Kageroa, Tuare, Gimpu, dan beberapa desa lainnya juga desa-desa yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini, air di wilayah ini belum dimanfaatkan secara intensif namun sangat penting dalam memberikan pasokan air irigasi dan kebutuhan air minum bagi banyak desa kecil dan terpencil di wilayah ini.

Wilayah tangkapan sungai Gumbasa lebih kecil dari DAS Lariang dan memiliki sekitar 60 wilayah sub-DAS dalam TNLL. Wilayah tangkapannya lebih luas di luar TNLL dan menyediakan pasokan air untuk wilayah pertanian yang luas termasuk *enclave* Lindu dimana terdapat perumahan penduduk, lahan pertanian dan hutan alam yang sudah lama dimanfaatkan. Sungai Gumbasa dimanfaatkan secara luas karena melintasi wilayah pertanian di lembah Palolo, di mana beberapa anak sungai sekitar TNLL bergabung dengan sungai utama. Sungai Gumbasa kemudian masuk kembali ke TNLL sepanjang kira-kira 12 km dan muncul kembali di lahan-lahan pertanian di Lembah Palu melalui sungai Palu. Baik di Lembah Palolo dan Palu, Sungai Gumbasa secara luas telah dimodifikasi untuk memfasilitasi lahan-lahan pertanian. Ada dua implikasi utama dari kondisi tersebut: a) kegiatan pertanian yang terjadi di sepanjang aliran sungai yang mengarah ke Taman Nasional Lore Lindu, perlu diperhatikan lebih intensif agar tidak terjadi perluasan lahan pertanian, b) pemanfaatan pestisida dan pupuk yang digunakan pada pertanian lahan basah di



Lembah Palolo memerlukan upaya monitoring yang intensif dalam jangka panjang.

## 6. Potensi Hayati

### Potensi Flora

Berdasarkan karakteristik flora (tumbuhan) penyusunnya dan faktor edaphis maka pada wilayah TNLL dikenal terdapat sembilan tipe vegetasi utama, yaitu:

#### 1) Rawa

Wilayah-wilayah tidak terairi dengan baik pada berbagai tipe tanah dan pada beberapa ketinggian. Contoh wilayah ini adalah di sebelah timur Danau Lindu. Pohon-pohon pandan yang tinggi (tinggi >20 m), kebanyakan bercabang dengan akar-akar gantung, sering mendominasi tepi-tepi wilayah Danau Lindu ini, dengancampuran pohon-pohon *Dacrydium* sp. Bagian-bagian terbuka dari rawa didominasi oleh rerumputan dan sejenis pohon sagu dan disela oleh tandan-tandan semi-parasit berbunga ungu *Burmannia disticha*, anggrek besar yang tumbuh ditanah (*Phaius tankervilleae*), tumbuh-tumbuhan yang merambat dan berbentuk kendiyang tumbuh di tanah (*Nepenthes* spp.) serta sebuah spesies berbunga putih dari *Rhododendron* (Erica.).

#### 2) Hutan Kerangas

Hutan kering musiman pada pojok barat laut TNLL pada ketinggian rendah (300-700 m dpl). Hutan Karangas hanya ditemukan di perpanjangan barat laut TNLL. Hutan-hutan ini mengalami periode musim kering yang lebih dari tiga bulan dalam setahun dan mungkin merupakan salah satu dari sedikit contoh dari hutan Karangas di wilayah kepulauan di katulistiwa. *Pterospermum* cf. *diversifolium* (Sterc.), sebuah spesies pioner (Webb dan Yani, 1999) mendominasi satu plot yang dijadikan sampel di wilayah tersebut. Tidak ada wilayah hutan karangas secara utuh ditemukan dan mungkin berada dalam hutan yang telah rusak, membuat mereka sangat rentan.



3) Dataran rendah

Hutan yang terairi baik di sekitar batas-batas dari TNLL di bawah 900 m dpl. Hutan dataran rendah hanya berkontribusi kecil pada jenis – jenis vegetasi yang ditemukan di TNLL karena hampir 90% dari wilayah TNLL berada pada ketinggian di atas 900 m dpl. Spesies dari *Dipterocarpaceae* biasanya mendominasi wilayah yang terairi dengan baik pada lereng-lereng sedang sampai datar.

4) Pegunungan rendah

Hutan antara 900-1.500 m dpl, pada wilayah yang terairi baik sampai tanah yang lembab. Famili dari *Sapotaceae* dan *Fagaceae* mendominasi hutan pegunungan rendah yang terairi dengan baik, sementara banyak dari spesies-spesies individu seperti *Acer niveum* (Acer.), *Bruinsmia styracea* (Styra.), dan *Santiria* sp. (Burse.), merupakan karakteristik (tetapi tidak terbatas pada) sub-tipe hutan ini. *Annonaceae*, *Moraceae*, dan *Lauraceae* juga merupakan famili yang sering ditemukan dan tersebar di wilayah ini. Pohon-pohon palem yang tumbuh di darat (*Calamus* sp.) dan tumbuh-tumbuhan kayu merambat juga umum ditemui. Pohon-pohon yang lebih besar dari 60 cm DBH sering ditemui dan kanopi yang ada tersusun secara baik, tertutup, dan berlapis- lapis.

Hutan-hutan pegunungan yang rendah pada bagian utara lereng-lereng Gunung Nokilalaki sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Tetapi ke arah timur *enclave* Besoa dekat batas TNLL, hutan – hutan ini hampir tak dapat dibedakan karena memiliki kondisi yang sama namun mengalami sedikit atau tidak ada sama sekali gangguan manusia. Sebagian besar individu pohon beringin (*Ficus*, Morac.) dan beberapa spesies pohon uru (*Elmerillia* dan *Manglietia* (Magno.) sangat penting keberadaannya. *Eucalyptus deglupta* (Myrta.) tumbuh hampir ditempat yang murni sepanjang sungai dan anak sungai. *Pigafetta filaris* (Arace.) juga sering tumbuh dekat sungai dan anak sungai. Spesies pionir tahap akhir sering ditemuidan dapat mencapai ukuran yang besar seperti *Octomeles sumatrana* (Datis.), *Duabanga*



*moluccana* (Sonne.), dan *Cinnamomum* sp. (Laura.). Pohon yang umum dan berbedalainnya adalah *Bischofia javanica* sp. (Eupho.), dengan kulit kayu coklat tua, melengkungberlapis-lapis, berdaun tiga, dan getah merah pada bagian dalam kulit kayunya. Semak-semak yang tumbuh biasanya cukup lebat, dengan spesies beraneka macam dari *Elatostema* (Urtic.), *Piper* (Piper.), dan *Impatiens* (Balsa.) membentuk hampir sepertilapisan daun hijau yang tidak terputus-putus. Tumbuhan pemanjat pohon sering ditemukan di daerah ini.

Di wilayah-wilayah datar aluvial pada DAS di tengah Napu, sebelah utara Besoa, terdapat wilayah luas yang hampir seluruhnya berupa hutan pegunungan berawa, sebagaimana dinyatakan oleh Wirawan (1981). Di sini terdapat famili- famili *Magnoliaceae* dan *Annonaceae* yang mendominasi pepohonan yang tumbuh dan *Dysoxylum* spp. serta *Aglaiia* spp. (Melia.) adalah pohon-pohon yang umum ditemui di wilayah kanopi tengah. Bunga putih besar yang wangi dan berdaun bulu tebal dari spesies hemi-epifit *Fagraea* (Logan.) sering dijumpai pada lantai hutan dan tumbuh sepanjang tepi sungai. Sedikitnya tiga spesies dari *Saurauria* (Saura.) ditemui di tepi sungai dan sedang dalam berbunga. Terdapat pula wilayah yang dipadati oleh tumbuhan/iana dan rotan. Tempat yang dipadati oleh *Elatostema* (Urtic.) dengan individu yang tersebar dari *Impatiens* (Balsi.) ditemukan di semak-semak.

#### 5) Pegunungan

Hutan antara 1.300-1.800 m dpl. Sebuah indikator yang jelas dari tipe hutan ini adalah kehadiran dari *Castanopsis accuminatissima* (Fagac.). Secara lokal dikenal sebagai "kaha" atau "haleka", dan dapat dikenali secara mudah dengan banyaknya batang pohon dan batang tipis yang muncul dari dasar individu tunggal, demikian juga warna warni agak keemasan dari bawah daunnya. Beberapa spesies lainnya umumnya diasosiasikan dengan kaha, terutama "lihu" atau "tawako" - *Tristania whiteana* (Myrta.) dan "betau" - *Calophyllum* sp. (Clusi.). Spesies *myrtus* ditemukan pada *altitude* yang lebih tinggi dari kaha dan



terbatas pada wilayah-wilayah yang lebih kering. Batang kayunya yang licin dan terkelupas sama dengan *Eucalyptus*, tetapi berwarna putih kecoklatan. Kadang-kadang, spesies yang berbeda seperti *Podocarpus neriifolius* (Podoc.) dan *Dacrydium imbricatus* (Podoc.), dapat memiliki tingkat dominasi cukup tinggi pada saat kaha tidak ditemui. Secara khusus, *Drymis piperta* (Winte.), semak-semak kecil yang bercabang menghasilkan tandan-tandan bunga putih dan beberapa spesies dari *Alpinia* (Zinge.) umum ditemukan seiring dengan peningkatan kelembaban dan ketinggian.

6) Pegunungan tinggi

Hutan di atas 1.700 m dpl. Indikator yang paling mudah dari hutan ini adalah pohon tegak *Dawsonia* (berduri dan sepertipohon natal, tumbuh-tumbuhan lumut ini sering memiliki tinggi 10 cm. Tumbuh-tumbuhan bambu kecil, seperti *Begonia* spp. (Begon.), *Elatostema* spp. (Urtic.) dan *Cyrtandra* spp. (Scrop.) cukup beragam dan sering ditemui di semak-semak di bawah kondisi-kondisi basah. Individu-individu yang terpencah dari *Agathis* cf. *Celebica* (Aurac.), *Ternstroemia* spp. (Theac.), *Lithocarpus* spp. (Fagac.), dan *Phyllocladus hypophyllus* (Podoc.) menggantikan kaha dan lihu sering ditemukan pada ketinggian yang lebih rendah. Famili-famili dari Lauraceae dan Myrtaceae juga sering ditemukan dan bermacam-macam jenisnya disini. Pohon-pohon pakis, *Cyathea* spp. (Cyath.), beberapa spesies pandan, *Pandanus* spp. (Panda.), dan palem pinang (*Arenga* spp.) adalah pohon-pohon kecil yang umumnya tumbuh di bawah pohon besar di hutan ini.

7) Hutan semak belukar

Hutan yang terhalang pada tanah kering dengan akumulasi humus yang signifikan, terdapat pada beberapa ketinggian tetapi seringkali berada di atas ketinggian 1.800 m dpl.

8) Hutan awan

Hutan basah terhalang di atas 1.900 m dpl. Struktur hutannya hampir seluruhnya terdiri dari pohon-pohon ramping, kebanyakan berbunga



merah dan putih *Rhododendron* sp. (Erica.), serta memiliki sebuah daun kecil *Eugenia* (Myrta.). Kadang-kadang individu-individu yang terhalang, mencapai diameter yang besar dapat ditemukandi sini, khususnya *Phyllocladus hypophyllus* (Podoc.). Tumbuh-tumbuhan bambu berbunga putih dan semi parasit *Burmanna* sp. (Burma.), serta tumbuhan yang bentuknya seperti tempat air yang merambat *Nepenthes* sp. (Nepen.), banyak sekali jumlahnya. Pada puncak-puncak gunung di atas ketinggian 2.000 m dpl, hutan ini dibedakan oleh pertumbuhan tebal dari tumbuhan lumut dan sejenis pohon kecil jamur dan alga yang menutupi batang, ranting, dan bahkan daun dari pohon-pohon yang ada.

#### 9) Anthropogenik

Variasi jenis yang luas, dari hutan-hutan tua sekunder, biasanya di bawah 1.500 m dpl, untuk membuka padang rumput.

#### Potensi Fauna

Sampai saat ini, 225 jenis burung telah tercatat di TNLL, termasuk 78 jenis endemik Sulawesi dan 46 jenis yang penyebarannya terbatas. TNLL adalah rumah bagi 80% burung endemik Sulawesi dan rumah bagi 82% jenis yang penyebarannya terbatas. Ini meliputi jenis terkenal seperti Maleo (*Macrocephalon maleo*) dan Burung enggang Red-Knobbed (*Rhyticeros cassidix*) yakni jenis yang digunakan di dalam logo TNLL. Disamping itu juga meliputi jenis *Woodcock* Sulawesi (*Scolopax celebenis*), Geomalia (*Geomalia Heinrichi*) dan Nightjar Satanic (*Eurostopodus diabolicus*), Elang Sulawesi (*Spizaetus lanceolatus*), serta beberapa jenis burung yang menjadi target pengamatan untuk kegiatan *Bird Watching* (pengamatan burung) seperti Malia (*Malia grata*), Sikatan Burik (*Muascicapa griseisticta*) dan Anis Punggung Merah (*Zoothera erytronota*). Menurut beberapa pengamat burung bahwa kawasan TNLL menjadi surga pengamat burung (*paradise of bird watchere*).

Keberadaan mamalia di TNLL yang telah berhasil didokumentasikan adalah Anoa (*Bubalus spp.*), Babirusa (*Babyrousa babirusa*), dan dua jenis



Tarsius (*Tarsius pumilus*, *Tarsius lariang*, dan *Tarsius dentatus*). Jenis lain yang juga diketahui keberadaannya adalah Babi liar Sulawesi (*Sus celebensis*), Monyet boti (*Macaca tonkeana*), Kuskus beruang (*Ailurops ursinus*) dan musang (coklat) Sulawesi (*Macrogalida musschenbroekii*).

Dari beberapa survey yang telah dilakukan, lebih lanjut diperoleh informasi mengenai mamalia kecil di TNLL, antara lain kelompok tupai dan kelelawar pemakan serangga. Diantara kesenjangan informasi ini, 77 jenis sudah secara pasti tercatat di TNLL (termasuk 47 jenis endemik Sulawesi), dan keberadaan 36 jenis lainnya akan dipastikan lebih lanjut. Dengan demikian TNLL merupakan rumah bagi 89% jenis binatang menyusui Sulawesi. Jika kelelawar dikeluarkan dari data, maka 48 jenis binatang menyusui telah tercatat, dan itu meliputi 85% jenis endemik Sulawesi.

Penelitian tentang reptil telah mengidentifikasi 24 spesies dari 13 famili. Yang paling terkenal mungkin adalah ular sanca bergaris-garis seperti jaring (*Python reticulatus*). Ular ini umum ditemui di TNLL di bawah ketinggian 1.000 mdpl, dimana mungkin ular ini merupakan satwa predator paling terkenal dan dapat mencapai panjang lebih dari 6 m. Ular yang paling sering diamati adalah ular hitam yang tidak berbisa (*Elapheerythura* dan *E. janseni*), walaupun banyak juga jenis ular lain yang ditemui dalam TNLL termasuk King Cobra (*Ophiophagus hannah*) dan ular pohon hijau (*Ahaetulla prasina*). TNLL juga merupakan habitat bagi kura-kura darat endemik Sulawesi dan baru sedikit diketahui. Selain itu TNLL adalah habitat bagi kadal *sailfin* yang spektakuler (*Hydrosaurus amboinensis*), kadal agamid terbesar di dunia yang panjangnya dapat mencapai lebih dari 1m.

Setidaknya 21 spesies amfibia telah ditemukan di TNLL, termasuk empat bentuk yang mungkin mewakili spesies baru. Sedangkan untuk invertebrata, satu-satunya kelompok yang telah dipelajari secara umum adalah Lepidoptera. Sebuah studi tentang kupu-kupu di sekitar Kamarora mengungkapkan adanya 31 spesies dari empat famili.



## 7. Potensi Wisata

Kondisi keindahan lansekap, kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi sosial dan nilai-nilai budaya tradisional masyarakat suku asli Sulawesi Tengah (adat istiadat, musik bambu, dero/tarian daerah), serta keberadaan peninggalan megalith dapat dikemas sebagai produk wisata yang memiliki nilai jual tinggi. Potensi pariwisata di sekitar TNLL dapat dikelompokkan ke dalam kondisi biofisik alamnya, keutuhan hutan dan keragaman hayatinya, serta keadaan sosial budayanya. Pariwisata di dalam dan sekitar TNLL mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar: 1) budaya (megalith, kegiatan pertanian, kerajinan tangan); 2) basis-alam (pengamatan burung, pengamatan satwa, studi botani, studi geologi); 3) basis-aktifitas (arung jeram, jalan kaki, dan berkemah). Potensi wisata di TNLL selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Potensi Wisata di Taman Nasional Lore Lindu.

Lokasi	Tujuan	Objek Wisata
TNLL	Wisata alam	Gunung Nokilaki (2.355 mdpl)
		Gunung Rorekatimbu (2.610 mdpl)
		Gunung Anaso (2.000 mdpl)
		Trekking dari Bada-Besoa, Bada-Gimpu Besoa-Lawua dan Katu-Toro.
		Panorama Danau Lindu
		Panorama Danau Tambing
		Sumber air panas Sungai Rawa
		Burung Maleo
		Padang Rumput Siliwanga
	Bumi Perkemahan Saluki	
	Wisata budaya	Batuan Megalitik di Lembah Besoa dan Bada
		Adat istiadat suku Lore
		Rumah adat Tambi sebagai tempat menyimpan alat perang dan pusat kegiatan
Wisata ilmiah	Flora- fauna dan ekosistem asli TNLL	
	Sosiologi – Antropologi masyarakat	
	Geologi	
Sekitar TNLL	Wisata Alam	Sungai Lariang
		Sungai Miu
		Jalur Pengamatan Maleo
	Wisata Budaya	Kesenian Rego
		Desa Toro, Desa Pakuli



Beberapa paket wisata yang ditawarkan di TNLL selengkapnya dirangkum pada tabel 4.

**Tabel 4.** Paket Wisata yang ditawarkan di TNLL

No.	Paket	Jalur	Atraksi
1.	Paket Wisata Saluki-Mataue (2 Hari)	Palu - Saluki - Salua - Mataue - Palu	Tracking, Kemping, Makan Kaledo, Pengamatan Maleo, Tarsius, Burung, Anggrek dan Flora Fauna Khas Sulawesi.
2.	Paket Wisata Danau Tambing-Rore Katimbu-Anaso (2 hari)	<b>Opsi 1:</b> Palu - Wuasa - Danau Tambing - Rore Katimbu - Anaso - Palu <b>Opsi 2:</b> Palu - Danau Tambing - Rore Katimbu - Anaso - Palu	Tracking, Camping, Wisata Danau, Pengamatan Hutan Lumut, Pengamatan Burung dan Flora Fauna Pegunungan Khas Sulawesi.
3.	Paket Wisata Nokilalaki (2 hari)	Palu - Tongoa - Palu	Tracking Pendakian dan Camping
4.	Paket Wisata Danau Lindu - Rahmat (3 Hari)	Palu - Sidaunta - Dataran Lindu (Puroo/Langko/ Tomado/ Anca) - Palili - Rahmat -Palu	Wisata Danau, Memancing, Berperahu, Tracking, Camping, Pengamatan Burung Danau dan Hutan, Pengamatan Anggrek dan Flora Fauna Khas Sulawesi.
5.	Paket Wisata : Lembah Besoa - Lawua (4 Hari)	Palu - Doda - Seputar Lembah Besoa - Baleura - Lawua - Palu	MelihatSitus Megalith, Tracking, Camping, Pengamatan Flora Fauna Khas Sulawesi
6.	Paket Wisata: Saluki - Danau Lindu - Rahmat- Kadidia - Kamarora (4 Hari)	Palu - Saluki - Salua - Sidaunta - Dataran Lindu - Rahmat - Kadidia - Kamarora - Taman Konservasi Tarsius - Air Terjun Kamarora - Kamarora - Palu	Tracking, Camping, Makan Kaledo, Pengamatan Maleo, Tarsius, Burung, Anggrek dan Flora Faunakhas Sulawesi.
7.	Paket Wisata : Kadidia - Kamarora (2 Hari)	Palu - Kadidia - Kamarora -Taman Konservasi Tarsius - Air Terjun Kamarora - Kamarora - Palu	Tracking, Camping, Pengamatan Tarsius, dan Flora Fauna Khas Sulawesi.



## 7. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Desa-desa di sekitar TNLL saat ini dihuni oleh perpaduan penduduk asli dan penduduk migran. Migrasi banyak terjadi sejak tahun 1997 yang disebabkan oleh menurunnya kondisi ekonomi Indonesia serta konflik di daerah lain yang memicu perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Migrasi tersebut antara lain didorong oleh pencarian tempat hidup yang lebih aman, kehilangan pekerjaan di tempat lain, atau mencari wilayah-wilayah baru untuk ladang pertanian.

Tidak ada satu pun wilayah di Lore Lindu yang dapat dianggap homogen secara etnis atau budaya. Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari 15 kelompok masyarakat asli dan berbicara dengan 24 bahasa yang berbeda. Setengah dari penduduk yang tinggal di sekitar TNLL adalah para pendatang baru atau keturunan dari para pendatang tersebut. Mayoritas dari penduduk yang pindah ke wilayah TNLL adalah peserta program transmigrasi formal (puncaknya di tahun 1970-1980-an) atau migrasi informal. Banyak terdapat para migran ekonomi, sementara yang lainnya orang yang mengasingkan diri secara internal yang pindah ke wilayah Lore Lindu karena kerusuhan atau konflik.

Sebuah klasifikasi yang digunakan oleh Caldecott dan Ng Forge (1996), terdapat empat pengelompokan penduduk asli di dalam dan di sekitar kawasan TNLL, yaitu: Bada, Behoa, Pekurehua dan Kaili. Penduduk tersebut diasosiasikan secara luas dengan lembah-lembah dan wilayah-wilayah utama. Walaupun terdapat keterkaitan budaya dan bahasa, garis silsilah yang panjang serta isolasi geografis telah menghasilkan perbedaan-perbedaan budaya yang diungkapkan dalam mitos, dialek, dan ritual asli. Nampaknya penduduk yang bermukim di wilayah Lore Lindu berkaitan dengan penduduk yang bermukim lebih jauh di sebelah selatan. Sebagai contoh, penduduk Kaili dikenal sebagai sebuah kesatuan sosial dan politik yang berbeda selama abad ke-17, walaupun mereka tidak sepenuhnya merdeka dari kerajaan yang amat berkuasa yang berpusat di Sulawesi Selatan. Terlepas dari sejarah, keempat kelompok tersebut sekarang diasosiasikan kuat dengan wilayah Lore Lindu.



Total populasi penduduk di 61 desa yang berbatasan langsung dengan TNLL adalah 68.377 orang. Beberapa desa seperti Watumaeta, Pakuli, Tomado, Lawua, Rahmat, Tongoa, Sigimpu, Sintuwu, Wuasa dan Kaduaa, telah mengalami pertumbuhan populasi yang pesat. Watumaeta sebagai contoh memiliki tingkat pertumbuhan 8,9 % pertahun terutama bagi para migran dalam pulau. Namun sebaliknya, desa-desa di lembah Bada mengalami tingkat migrasi yang kecil serta memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Lelio memiliki nilai pertumbuhan 2,23% dan Tuare hanya 0,29% pada periode tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.

Perubahan-perubahan populasi yang cukup besar di sekitar TNLL jelas berdampak pada kondisi hutan di TNLL. Pertumbuhan populasi berarti peningkatan kebutuhan lahan dan karenanya meningkatkan tekanan pada TNLL. Saat dibandingkan dengan analisa perubahan, data ini menunjukkan bahwa ukuran populasi total sangat erat terkait dengan penggundulan hutan.

Pengamatan yang dilakukan dengan memanfaatkan citra tahun 1983-1999 telah menunjukkan perubahan yang signifikan pada kedua *enclave* selama lebih dari 16 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan pembukaan lahan di *Enclave* Besoa yang telah meluas. Pada gambar tahun 1983, pada bagian selatan tidak dapat dibedakan dengan mudah. Sementara pada gambar tahun 1999, pemukiman dapat terlihat secara jelas. Perubahan pada separuh wilayah datar dari *Enclave* Lindu juga sangat jelas. Perubahan ini berpindah dari desa-desa yang lebih mapan tepi perbukitan sebelah barat danau. Kegiatan pertanian melanggar kedua batas-batas *enclave*. Meskipun sementara hal ini bukan masalah yang besar pada saat ini, kegiatan pertanian ini berpotensi merugikan keberadaan hutan yang ada.

Tingkat pendidikan penduduk di desa-desa di sekitar TNLL masih relatif rendah. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah sekolah dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP), kurang dari 1 % penduduk di sekitar TNLL yang tidak pernah menjalani pendidikan formal atau



sekurang-kurangnya tidak tamat SD. Selain minimnya sarana prasarana sekolah, keterbatasan aksesibilitas juga menjadi penyebab tingkat pendidikan yang rendah tersebut. Kecamatan Sigi Biromaru memiliki penduduk yang umumnya telah mempunyai pendidikan yang cukup, sebaliknya kecamatan Lore Selatan relatif masih kurang maju dalam hal pendidikan.

Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Puskestu) tersebar diberbagai desa di sekitar TNLL. Puskesmas terletak di ibukota kecamatan desa Mataue, Kecamatan Kulawi (1), Wuasa, Kecamatan Lore Utara (2), Doda, Kecamatan Lore Tengah (3) dan di Gintu, Kecamatan Lore Selatan (4), Sedang 4 (empat) Puskestu terdapat di kecamatan Sigi Biromaru (Desa Omu, Pakuli, Tongoa, dan Rahmat), 6 (enam) di Kecamatan Kulawi (Desa Lawua, Oo, Toro, Salua, Langko, dan Tonado), 6 (enam) di Kecamatan Lore Tengah (Desa Hangira, Doda, Bariri) di Kecamatan Lore Utara (Talabosa, Betue, dan Watumaeta), Serta 4 (empat) di Kecamatan Lore Selatan (Desa Kageroa, Bodongkaia, Bulili, dan Bomba).

Lahan disekitar TNLL pada umumnya adalah daerah pegunungan terjal yang membatasi desa-desa terhadap empat sistem utama lembah yang mengelilingi TNLL. Kondisi lahan ini kemudian menentukan mata pencaharian desa-desa tersebut.

Pada tempat-tempat lain, seperti di sepanjang Lembah Napu, lahan yang ada bukanlah faktor yang membatasi perluasan upaya pertanian. Di dekat Wuasa, walaupun terdapat ketidak sepahaman mengenai hak-hak dan pemanfaatan lahan (kepemilikan tradisional dengan TNLL), kehadiran tapal batas nampaknya secara umum dihormati. Hal ini dikonfirmasi dengan pengamatan yang menyatakan bahwa para pendatang baru di wilayah ini, seperti orang-orang Bugis, hanya bercocok tanam hingga tanda-tanda batas beton wilayah TNLL

Mayoritas penduduk yang hidup di sekitar TNLL berpenghidupan sebagai petani yang sejak awal kehadirannya mengolah sawah lahan basah dengan sistem menetap. Di beberapa desa, Katu sebagai contoh,



masih terdapat beberapa sistem pertanian tebang dan bakar untuksawah kering, tetapi secara umum mata pencaharian lahan basah. Di samping itu, terdapat sejumlah kecil pedagang dan pejabat pemerintah. Namun demikian, mata pencaharian bagi kebutuhan rumah tangga di sekitar TNLL yang paling penting adalah pertanian lahan basah, pertanian lahan kering (termasuk jagung, kedele, kacang tanah, pohon buah-buahan, kopi, coklat, rempah-rempah, gula aren), ternak hewan (ayam, ikan), kerajinan tangan (produk-produk rotan, tikar, kain kulit kayu), produk-produk hutan (kayu, rotan), dan buruh musiman dan paruh waktu (buruh tani, beberapa memandu dan membantu para ilmuwan)

Sebagian besar hasil pertanian digunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan sisanya dijual di sekitar tempat mereka atau ke Palu. Pendapatan yang dihasilkan dan digunakan untuk membayar uang sekolah, membeli sabun, gula, bahan bakar dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

Pemanfaatan secara alami pohon-pohon bernilai ekonomis atau yang diusahakan oleh petani di sekitar batas hutan merupakan salah satu bagian penting dari ekonomi masyarakat setempat. Banyak keluarga memiliki kebun hutan sebagai tambahan sawah mereka. Pembuatan gula aren juga merupakan sumber pendapatan yang penting bagi beberapa keluarga. Nira aren dapat diminum langsung, juga dapat dimasak dahulu untuk membuat gula aren atau difermentasikan untuk menghasilkan minuman sejenis anggur (saguer). Sementara itu bagi sejumlah keluarga lainnya, rotan dan kayu dari hutan merupakan sumber pendapatan untuk tambahan dalam menunjang kebutuhan hidup mereka.

Sejak menurunnya kondisi perekonomian Indonesia dan rendahnya nilai tukar rupiah pada tahun 1998, terdapat peningkatan pertanian tanaman jangka menengah untuk perdagangan, khususnya kopi dan coklat mengandalkan sinar matahari langsung untuk produksi dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi TNLL. Hasil panen bahan makanan musiman, terutama jagung dan singkong juga ditanam pada lahan non-irigasi di lahan hutan yang telah digunduli. Kegiatan -



kegiatan seperti ini merupakan isu yang sangat penting karena pertanian lahan basah di wilayah sekitar areal ini terbatas.

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan TNLL sebagian besar merupakan suku asli, yang terdiri atas Suku Kaili (Kaili Ledo, Kaili Ija, Kaili Ado, kaili Moma, Kaili Tohulu dan Kaili Da'a), Suku Kulawi, Suku Behoa, Suku Pekurehua dan Suku Bada. Selain suku asli, terdapat juga para pendatang, seperti suku Bugis, Jawa, Toraja dan Bali.

Sering dinyatakan bahwa lembah Napu, Besoa dan Bada telah dihuni setidaknya selama 1.000 tahun. Mungkin saja bahwa terdapat budaya Melanesia menghuni lembah-lembah subur dari kawasan tersebut. Kruyt, seorang missionaris berkebangsaan Belanda yang mempelajari sejarah penduduk wilayah tersebut pada tahun 1930-an merupakan satu dari orang pertama yang berspekulasi bahwa rambut keriting yang diamati pada beberapa populasi menunjukkan sebuah karakteristik yang diturunkan dari leluhur Melanesia<sup>41</sup>.

Budaya berikutnya yang menghuni wilayah tersebut adalah terdapat sejumlah besar megalith, terdiri dari banyak bentuk dan ukuran. Terdiri dari patung-patung dan sarcopagus besar yang membuktikan adanya sebuah masyarakat yang terorganisasi dengan baik, mampu melaksanakan kegiatan bersama. Konstruksi dan pemindahan dari megalith yang keduanya sulit dilaksanakan dan menghabiskan waktu akan membutuhkan tambahan dan perpindahan keterampilan. Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki banyak waktu disamping kebutuhan mempertahankan hidup mereka seperti berburu dan pertanian. Sebagai tambahan, kepercayaan-kepercayaan budaya serta struktur sosial yang bertanggung jawab terhadap konstruksi megalith, telah ada sejak jangka waktu yang lama. Usia dari megalith masih bersifat perkiraan oleh sebab itu, hubungan antara budaya megalithik dan penduduk asli yang tinggal di sekitar TNLL saat ini masih misteri. Nampaknya dalam beberapa tahapan orang-orang Proto-Malay dan Paleo-Mongoloid telah bermigrasi ke wilayah ini, tetapi penelitian-penelitian diperlukan sebelum pertanyaan-pertanyaan



fundamental berkaitan dengan megalith terselesaikan dan pencipta megalith teridentifikasi.

Dua kepercayaan besar yang berkembang di masyarakat yang bermukim di wilayah yang berbatasan dengan TNLL adalah Islam dan Kristen. Penyebaran Islam terjadi hampir di seluruh Sulawesi Tengah terutama daerah dataran rendah seperti Kaili (Ija, Ledo, Ado, dan bagian-bagian dari Moma). Sedangkan daerah-daerah pertama yang menjadi penyebaran Kristen adalah Napu, Besoa, Bada, Lindu, Kulawi dan Palolo.

Sebagaimana banyak wilayah di sekitar Sulawesi, pedagang Muslim menyebarkan kepercayaan-kepercayaan agamanya, dimana agama Islam mendirikan sebuah daerah tumpuan sepanjang pantai Sulawesi pada abad ke-15. Masuknya penduduk ke agama Islam terjadi hampir diseluruh Sulawesi Tengah terutama daerah dataran rendah yang dihuni oleh etnis Kaili (Ija, Ledo, dan Ado) dan bagian-bagian dari etnis Moma.

Kristenisasi datang bersama orang Belanda di lembah-lembah dataran tinggi dengan kekuatan pada tahun 1906-1907. Hal ini menuntun pada gelombang masuknya misionaris agama Kristen Protestan di wilayah-wilayah tersebut, termasuk banyaknya Pembaptis. Pada tahun 1913 Bala Keselamatan mengirim misionaris-misionaris pertamanya ke daerah ini (Napu, Besoa, Bada, Lindu, Kulawi dan Palolo).

## B. KONDISI SAAT INI

### 1. Nilai Penting TNLL

Identifikasi Nilai Penting kawasan TNLL telah dilaksanakan sebagai landasan menentukan arah pengelolaan. Nilai penting kawasan digali berdasarkan kebijakan konservasi, *update* hasil penelitian, hasil survey dan patroli petugas. Daftar nilai penting TNLL disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Nilai Penting TNLL yang menjadi fitur target konservasi

Pertimbangan	Nilai penting
Penunjukan SM Lore Kalamanta berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 522/Kpts/UM/10/1973	Perlindungan satwa: 1. Anoa ( <i>Bubalus depressicornis</i> , <i>Bubalus quarlesi</i> ) 2. Babirusa ( <i>Babyrousa babyrousa</i> ) 3. Kera hitam Sulawesi ( <i>Macaca tonkeana</i> ) 4. Rusa ( <i>Cervus timorensis</i> )



Pertimbangan	Nilai penting
Penunjukan sebagai hutan wisata dan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri pertanian No. 46/Kpts/Um/1/78	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keindahan Panorama</li> <li>2. Pengaturan tata air, mencegah erosi dan banjir</li> </ol>
Kebijakan Konservasi	<p>TNLL mendapat mandat untuk peningkatan populasi Maleo, Anoa dan Babirusa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SK Dirjen KSDAE No.SK.180/IV-KKH/2015</li> <li>b. Permenhut P.55/Menhut-II/2013 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (<i>Babyrousa babyrousa</i>) tahun 2013-2022</li> <li>c. Permenhut P.54/Menhut-II/2013 Tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (<i>Bubalus depressicornis</i> dan <i>Bubalus quarlesi</i>) Tahun 2013-2022</li> </ol>
Status dalam Redlist IUCN	<p>Beberapa satwa penting di TNLL merupakan satwa endemik Sulawesi dengan status konservasi menurut IUCN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>) (Endangered)</li> <li>2. Babi Rusa (<i>Babyrousa babyrousa</i>) (Vulnerable)</li> <li>3. Elang Sulawesi (<i>Spizaetus/Nisaetus lanceolatus</i>) (Least Concern)</li> <li>4. Rangkong (<i>Rhyticeros / Aceros cassidix</i>) (Vulnerable)</li> <li>5. Rusa (<i>Cervus timorensis</i>) (Vulnerable)</li> <li>6. Monyet Hitam (<i>Macaca tonkeana</i>) (Vulnerable)</li> <li>7. Anoa Dataran Tinggi (<i>Bubalus quarlesi</i>) (Endangered)</li> <li>8. Anoa Dataran Rendah (<i>Bubalus depressicornis</i>) (Endangered)</li> <li>9. Tarsius Kecil (<i>Tarsius pumilus</i>) (Data Deficient)</li> <li>10. Tarsius (<i>Tarsius dentatus</i>) (Vulnerable)</li> <li>11. Tarsius lariang (<i>Tarsius lariang</i>) (Data Deficient)</li> <li>12. Musang Sulawesi (<i>Macrogalidia musschenbroekii</i>) (Vulnerable)</li> <li>13. Kura-kura/Baning Sulawesi (<i>Indotestudo forstenii</i>) (Endangered)</li> <li>14. Kuskus Beruang (<i>Ailurops ursinus</i>) (Vulnerable)</li> <li>15. Kuskus Kecil Sulawesi (<i>Strigocuscus celebensis</i>) (Vulnerable)</li> <li>16. Burung setan (<i>Satanic nightjar</i>) (Vulnerable)</li> </ol>
Status dalam SK Dirjen KSDAE No. SK.180/IV-KKH/2015 Penetapan 25 jenis satwa prioritas terancam punah yang dilindungi	<p>Berdasarkan SK Dirjen KSDAE No. SK.180/IV-KKH/2015, Taman Nasional Lore Lindu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anoa (<i>Bubalus depressicornis, Bubalus quarlesi</i>)</li> <li>2. Babirusa (<i>Babyrousa babyrousa</i>)</li> <li>3. Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>)</li> <li>4. Tarsius (<i>Tarsius spp</i>)</li> <li>5. Elang (<i>Spizaetus lanceolatus</i>)</li> <li>6. Rangkong (<i>Rhyticeros cassidix</i>)</li> </ol>
Berdasarkan literature, penelitian dan hasil inventarisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burung Rangkong masih banyak dijumpai di kawasan TNLL hal ini menunjukkan bahwa kawasan TNLL menjadi habitat yang baik untuk burung rangkong.</li> <li>2. Dijumpai potensi Sugili (sidat) berukuran besar</li> <li>3. Terdapat potensi HHBK rotan di Desa Toro,</li> </ol>



Pertimbangan	Nilai penting
	<p>Kamarora dan Lindu yang telah dimanfaatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terdapat potensi HHBK getah damar di beberapa desa seperti di Desa Sedoa, Toro, Lembah Besoa dan Lembah Bada.</li> <li>5. Kawasan TNLL merupakan daerah sebaran situs megalit.</li> <li>6. <i>Tarsius pumilus</i> merupakan tarsius terkecil berukuran antara 93-98 milimeter dan berat 57 gram, habitatnya di TNLL pada ketinggian 2200 mdpl. Sampai saat ini belum ditemukan di tempat lain.</li> <li>7. Ditemukan spesies baru di TNLL yaitu Burung Sikatan Sulawesi (<i>Muscicapa sodhii</i>) temuan ini telah dimuat dalam Jurnal Ilmiah Plosone edisi 24 November 2014. (Harris JBC, Rasmussen PC, Yong DL, Prawiradilaga DM, Putra DD, et al. (2014)</li> <li>8. Tingginya keragaman jenis dan populasi burung di TNLL menyebabkan beberapa pengamat burung memberikan "label" pada kawasan TNLL sebagai surga pengamat burung (<i>paradise of bird watchers</i>), hal tersebut diperkuat oleh <i>Bird Life International</i> yang menempatkan kawasan TNLL sebagaikawasan burung endemik (<i>endemic bird area</i>).</li> <li>9. Terdapat beberapa <i>nesting ground Maleo</i> seperti Pakuli, Saluki, Tuva, Bora, Mapane, Kadidia, Hulurawa, Taveki, Kaya, Mangku dan Karatambe yang sangat dipengaruhi oleh panas bumi (<i>Geothermal</i>).</li> <li>10. Penelitian Monyet Boti (<i>Macaca tonkena</i>) oleh Dr. Erin P. Riley dari Department of Anthropology, San Diego State University, San Diego, California di TNLL wilayah Desa Anca, Enclave Lindu, tahun 2008 menunjukkan bahwa keberadaan habitat alami dari kelompok <i>M. tonkena</i> berpengaruh pada perilaku satwa tersebut khususnya dalam mencari makanan artinya jika makan di alam tersedia maka monyet tidak keluar mengganggu kebun masyarakat.</li> <li>11. Hasil survey mamalia kecil di TNLL, khususnya dari kelompok tupai dan kelelawar pemakan serangga tercatat 77 jenis dan 47 jenis diantaranya termasuk endemik Sulawesi.</li> </ol>
<p>Berdasarkan aktifitas yang sedang dilakukan berkenaan dengan target konservasi TNLL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan penangkaran semi alami burung Maleo</li> <li>2. Monitoring Populasi satwa (Anoa, Babirusa dan Maleo) pada <i>site monitoring</i>.</li> <li>3. Pengembangan destinasi wisata alam dan ekowisata.</li> <li>4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNLL yang mengarah pada implementasi kemitraan konservasi di Taman Nasional.</li> </ol>
<p>Keterwakilan ekosistem</p>	<p>Merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan</p>



Pertimbangan	Nilai penting
	pegunungan sulawesi terluas dan kompak, disusul kemudian oleh TN gandang Dewata, CA Morowali dan TN Bogani Nani Wartabone
Hidrologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan hulu DAS Lariang Hulu dan DAS Palu. Pada beberapa lokasi telah dibangun bendungan untuk mengairi sawah di desa-desa sekitar kawasan TNLL</li> <li>2. Terdapat danau dan sungai yang digunakan untuk kebutuhan hidup, berfungsi wisata dan sumber protein ikan</li> </ol>
Budaya/sejarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 65 situs megalith di TNLL dan sekitarnya yang berasal dari masa 300 Masehi dalam bentuk arca, menhir, kalamba, dolmen, altar, batu dalkon, batu temu gelang, dulang batu, tempayang kubur dan lumpang batu (Pengolahan Data BBTNLL 2018).</li> <li>2. Terdapat komunitas masyarakat hukum adat di TNLL dan sekitarnya yang berinteraksi langsung dengan kawasan TNLL antara lain pengambilan bahan pembuatan kain kulit kayu. Selain itu beberapa wilayah di dalam TNLL merupakan "kampung tua" seperti di Desa/Ngata Toro.</li> </ol>
Kearifan Lokal Masyarakat	<p>Sebagian besar komunitas masyarakat hukum adat di TNLL di sekitar TNLL memiliki kearifan dalam memandang kawasan hutan yang cenderung sejalan, konsep pengelolaan taman nasional antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan yang berada di puncak gunung yang tidak boleh diganggu. (Komunitas hukum adat di Kulawi Kab. Sigi disebut <i>Wanakiki &amp; Wana</i> sedang di Lore Kab. Poso disebut <i>Wumbu Wana &amp; Wana</i>).</li> <li>2. Dalam pemanfaatan sumberdaya hutan komunitas masyarakat hukum adat di Toro dan Lindu mengenal istilah "Ombo" yaitu penghentian sementara pengambilan hasil hutan untuk memberikan kesempatan pemulihan dan meningkatkan potensinya di alam. Seperti yang diterapkan di Desa/Ngata Toro, melalui ketetapan lembaga adat telah melakukan <i>Ombo</i> terhadap HHBK Rotan selama 6 tahun. Hasilnya sangat baik di mana potensi rotan di Toro kembali pulih.</li> <li>3. Terdapat kesadaran bahwa pelestarian hutan di sekitar "kampung" menjadi sangat penting karena kerusakan hutan akan berdampak pada kehidupan mereka.</li> </ol>
Struktur lansekap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 85% batas TNLL berinteraksi langsung dengan fungsi APL yang merupakan ruang budi daya.</li> <li>2. Bertumpang susun dengan 79 desa, 14 kecamatan, 2 kabupaten (Sigi dan Poso).</li> <li>3. Bertumpang susun dengan 14 wilayah adat seluas 108.806 Ha.</li> <li>4. Bentuk <i>matrix</i> Poligon kawasanTNLL relatif kompak dengan 3 patch enclave dan Koridor jalan transportasi.</li> </ol>



Kawasan konservasi ini mempunyai banyak nilai penting, sehingga selain ditetapkan sebagai taman nasional, beberapa pengakuan yang telah diterima Taman Nasional Lore Lindu, antara lain:

❑ Sebagai Cagar Biosfer UNESCO

Pada tahun 1977, Areal ini diresmikan sebagai Cagar Biosfer didalam Program *Man and the Biosphere* (MAB) UNESCO. Cagar Biosfer dirancang sebagai "*lokasi-lokasi eksperimen untuk pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pemantauan ekosistem dan konservasi biodiversitas*. Biosfer juga dimaksudkan untuk "*meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar suaka*" UNESCO (1995). Dengan demikian peran masyarakat setempat perlu ditingkatkan terutama dalam kesadaran dan pengetahuan, dan ini dapat diperbaiki dengan hubungan yang lebih aktif antara program MAB dan para perencana TNLL dan zona penyangga.

❑ Usulan Lokasi Warisan Dunia (*World Heritage Site*) UNESCO

Kawasan ini juga telah diusulkan menjadi lokasi warisan dunia oleh Pemerintah Indonesia dengan dasar lokasi yang memiliki peran budaya dan arkeologi serta lokasi yang memiliki peran ekologi dan lansekap. Dengan demikian, nominasi ini akan meningkatkan kesadaran bukan hanya mengenai patung-patung yang ada, tetapi juga mengenai megalit-megalit lain yang ditemukan di Lembah Besoa, Napu dan Bada. Pada saat ini untuk mencapai status sebagai lokasi warisan dunia diperlukan usaha-usaha yang menghubungkan sejarah alam dan budaya kawasan ini.

❑ Sebagai Kawasan Burung Endemik (EBA)

Birdlife International telah mengidentifikasi 218 Kawasan Burung Endemik (EBA), termasuk EBA Sulawesi. Empat puluh dua jenis yang berhabitat terbatas merupakan burung endemik EBA Sulawesi. Sebagai tambahan, 12 jenis dengan habitat terbatas dimiliki EBA Sulawesi dan EBA-EBA lain. Secara keseluruhan, 48 jenis yang



terbatas habitatnya telah tercatat di Sulawesi Tengah, 46 di antaranya telah terlihat di TNLL.

❑ Sebagai Pusat Keanekaragaman Tumbuhan (CPD)

Kawasan Lore Lindu juga diakui sebagai Pusat Keanekaragaman Tumbuhan (*Centre of Plant Diversity – CPD*). Secara keseluruhan WWF dan IUCN telah mengidentifikasi 234 CPD (WWF dan IUCN 1994). Kawasan-kawasan demikian biasanya kaya species atau berisi sejumlah besar spesies endemik. Untuk bisa dimasukkan sebagai CPD, kawasan-kawasan yang berbasis pulau harus memiliki paling sedikit 50 spesies endemik, atau paling sedikit 10% floranya haruslah endemik. Ciri-ciri sekunder tambahan bisa dipertimbangkan, misalnya: pengakuan sebagai kumpulan plasma nutfah bagi tanaman yang memiliki nilai tinggi atau nilai potensial bagi manusia; pemilikan keanekaragaman jenis habitat; adaptasi sejumlah besar spesies pada kondisi tanah yang khas; dan daerah-daerah yang terancam kerusakan besar.

❑ Wilayah Ekologi Global 200 (Global 200 Ecoregions-G200 ES)

TNLL sebagai bagian dari Sulawesi/Wallacea termasuk salah satu 'Wilayah Ekologi Global 200'. Yang dikembangkan oleh WWF-US (Olsen dan Dinerstein 1998) untuk menjadi G200 ES adalah contoh-contoh luar biasa ekosistem terestrial dan kelautan dunia. Seleksi didasarkan pada parameter-parameter seperti kekayaan spesies, endemisme spesies, keunikan taksonomi yang tinggi, fenomena ekologi dan evolusi yang luar biasa, serta habitat-habitat yang utama.

## 2. Kondisi dan Status Kawasan

Analisis keberlanjutan digunakan untuk menggali permasalahan dan isu-isu strategis berkaitan dengan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Untuk maksud tersebut maka data dasar yang digunakan adalah data hasil pengisian data METT 2015, hasil skoring Indeks Kesehatan Ekosistem TNLL 2013 dan hasil score-card *Enhancing Protected Area in Sulawesi Scheme* (EPASS) dan *Forest Program* (FP III)-KFW 2014. Analisis ini



menggunakan Aplikasi Program Rapfish yang disesuaikan dengan keadaan di TNLL sehingga dinamakan Rapid Appraisal Lore Lindu (RALL). Analisis tersebut mengantisipasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Penurunan jumlah populasi species prioritas;
2. Gangguan terhadap flora fauna;
3. Permasalahan zoonosis di beberapa lokasi;
4. Terganggunya ekosistem asli dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berdampak pada tidak stabilnya debit sungai, tingginya tingkat erosi dan sedimentasi;
5. Permasalahan batas kawasan (konflik batas kawasan);
6. Perambahan kawasan masih cukup tinggi;
7. Belum adanya base line data untuk mendukung pengelolaan spesies dan habitat;
8. Belum tersosialisasinya peraturan perundangan dengan baik;
9. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat hukum adat - masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;
10. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kawasan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
11. Minimnya jumlah riset untuk mendukung pengelolaan kawasan
12. Jumlah dan kompetensi staf masih belum memadai;
13. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait;
14. Integrasi dokumen perencanaan;
15. Belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan yang dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
16. Ketersediaan anggaran masih belum mencukupi kebutuhan pengelolaan;
17. Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan kawasan kurang memadai;
18. Kolaborasi dengan Para pihak belum berjalan dengan baik;

Meskipun permasalahan di atas saling terkait satu dengan lainnya, tetapi dapat dipilah ke dalam lima isu strategis, yaitu:

- a. Perlunya Mempertahankan Kesehatan Spesies



Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki kekayaan biodiversitas baik spesies baik flora maupun fauna. Taman nasional ini terdiri dari hutan dataran rendah dan hutan pegunungan dataran tinggi, lembah, sungai, danau dan mata air. Namun demikian indikasi akan adanya ancaman terhadap species utamanya spesies prioritas telah menggejala sejak 5 sampai 10 tahun belakangan ini. Beberapa gejala tersebut dapat, misalnya, pada satwa prioritas sebagai berikut:

- 1) Anoa (*Bubalus spp*) merupakan suatu jenis satwa yang sudah terancam punah. Jenis satwa ini adalah jenis satwa endemik Sulawesi. Masih ada perbedaan pendapat apakah anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*) dan anoa dataran tinggi (*Bubalus quarlesi*) merupakan satwa yang benar-benar berbeda, tetapi yang jelas informasi ilmiah mengenai ekologi dan sejarah kehidupan masih sangat sedikit. Jenis satwa ini memerlukan perlindungan dari kegiatan perburuan. Penegakan hukum, penyadaran dan pendidikan lingkungan merupakan prioritas yang perlu diperhatikan.
- 2) Babirusa (*Babyrousa babyrussa*) merupakan jenis satwa yang digolongkan sebagai jenis rentan. Babirusa merupakan satwa hutan tropis basah yang menyukai lingkungan tepi sungai dan danau dan merupakan satwa omnivor yang mengkonsumsi dedaunan, akar-akaran, buah dan dan hewan-hewan kecil (baik vertenrata maupun invertebrata). Menurut laporan babirusa juga mengalami perburuan dan perusakan habitat seperti perambahan dan penebangan liar sangat mengancam kehidupan satwa ini.
- 3) Maleo (*Macrocephalon maleo*) merupakan satwa burung yang juga mengalami keterancaman. Ancaman yang paling serius adalah pengambilan telurnya dan fragmentasi habitat. Habitat bertelurnya hendaknya terbebas dari *predator* dan gangguan akibat kegiatan illegal di habitatnya.



- 4) Jenis satwa lain yang mengalami ancaman karena sifatnya yang rentan adalah kuskus beruang (*Ailurops ursinus*), dan monyet boti (*Macaca tonkeana*).

Dinamika populasi species prioritas di TNLL dari tahun 2013 sd tahun 2019 disajikan pada tabel 6.

**Tabel 6.** Hasil monitoring satwa prioritas TNLL tahun 2013 - 2019

No.	Spesies	Σ Populasi												
		2013 (Baseline)	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	Anoa	77	102	<b>32.47</b>	71	<b>-7.79</b>	36	<b>-53.25</b>	14	<b>-81.82</b>	10	<b>-87.01</b>	24	<b>-68.83</b>
2	Babirusa	74	221	<b>198.65</b>	33	<b>-55.41</b>	81	<b>9.46</b>	148	<b>100</b>	41	<b>-44.59</b>	22	<b>-70.27</b>
3	Maleo	646	147	<b>-77.24</b>	973	<b>50.62</b>	1001	<b>54.95</b>	783	<b>21.21</b>	1018	<b>57.59</b>	1032	<b>59.75</b>
Rata-rata		265.67	156.67	51.29	359.00	-4.19	372.67	3.72	315.00	13.13	356.33	-24.67	359.33	-26.45

Selain itu, pengambilan jenis flora secara illegal juga terjadi, misalnya rotan, bambu dan berbagai jenis anggrek.

b. Perlunya Mempertahankan Keandalan Habitat

Habitat merupakan suatu faktor yang sangat penting karena merupakan "tempat" bagi kelangsungan hidup organisme baik flora maupun fauna. Sebab itu maka segala bentuk gangguan baik dari dalam maupun dari luar selalu harus diantisipasi dan bahkan dihindarkan.

c. Perlunya Mempertahankan Integritas Lingkungan, Sosial, dan Kerangka Hukum

Integritas lingkungan, aspek sosial dan kerangka hukum merupakan tiga pilar yang penting dalam mempertahankan keutuhan suatu taman nasional. Ketidakpastian hukum akan berdampak negatif kepada lingkungan dan aspek sosial kemasyarakatan. Kurangnya pengakuan masyarakat terhadap tata-batas, misalnya, akan membawa situasi konflik antara pengelola TNLL dengan masyarakat. Sebab itu maka aspek legal akan menjadi lemah dan berpengaruh pada semakin banyaknya kegiatan illegal di dalam kawasan. Sebab itu maka kunci utama adalah perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama parapihak (swasta, masyarakat dan pemerintah daerah). Sebagai suatu kawasan yang tidak dapat berdiri sendiri secara ekologis, perubahan eksternal



hendaknya tidak malah justru membawa dampak negatif pada kawasan. Pertumbuhan ekonomi yang memicu pada meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat seringkali harus diantisipasi, misalnya penggunaan jalan untuk transportasi hasil-hasil pertanian dan kegiatan wisata.

- d. Perlunya peningkatan pengelolaan obyek wisata alam dan budaya/situs megalith

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu sebagai ekosistem alami (salah satu perwakilan ekosistem yang lengkap di Sulawesi Tengah) tentunya memiliki potensi wisata alam sangat tinggi. Selain itu terdapat potensi budaya dan situs megalit yang terdapat di sekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu sehingga menjadi salah faktor ditetapkannya Cagar Biosfer Lore Lindu pada tahun 1977. Potensi yang sangat besar ini perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan wisata mencakup aspek perencanaan (desain tapak), pembangunan saran/prasarana, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran serta penyiapan SDM dalam pengelolaan wisata alam.

- e. Perlunya Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Riset, dan Sumberdaya Manusia

Sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi maka BBTNLL perlu untuk memberikan fokus kepada hal-hal kelembagaan sebagai berikut:

- Efisiensi, yakni menjadikan staf dan karyawan pada pembiasaan untuk bersikap hemat sehingga segala biaya dan penggunaan aset yang berkaitan dengan dengan lembaga dilakukan secara efisien.
- Kredibilitas/Legitimasi, yakni suatu kemampuan yang dimiliki oleh lembaga sehingga sehingga semua staf dan karyawan memiliki kredibilitas dan menjadikan suatu norma yang disepakati untuk menjadi dasar *code of conduct*.
- Keamanan, yakni kemampuan lembaga untuk menjamin keamanan termasuk di dalamnya kesejahteraan staf dan karyawan, serta keamanan dalam menjalin hubungan dengan dunia eksternalnya.



- Adaptabilitas dan Dinamika, yakni kemampuan lembaga yang dibangun untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap misi yang diembannya sebagai bentuk respon terhadap faktor perubahan yang terjadi.

Selanjutnya, kualitas lembaga sebagaimana disebutkan di atas perlu ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal. Beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian menyangkut aspek sumber daya manusia BBTNLL adalah:

- Perlunya kualitas sumber daya manusia yang dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien;
- Perlunya secara kontinyu memperhatikan kemampuan dan keterampilan staf dan karyawan sehingga selalu siap dalam mengemban promosi jabatan dan kepangkatan.
- Perlunya selalu mempertahankan harmonisasi lembaga dan staf/karyawan melalui pengembangan hubungan koordinatif yang serasi dan hirarkis yang seimbang.
- Perlunya mengembangkan kerjasama tim kerja inter dan antar divisi dalam lembaga.
- Perlunya menjaga proyeksi kesesuaian antara individu dan tanggung jawabnya (*the right man on the right place*).

Sementara itu, sebagai suatu lembaga konservasi maka lembaga ini perlu menjaga kredibilitas dan objektivitasnya dalam setiap pengambilan keputusan. Sebab itu, maka BBTNLL perlu menjaga integritas keilmuan dengan mendasarkan kebijakan konservasinya pada platform data dan informasi yang berbasis ilmu pengetahuan. Dengan demikian, baik kebijakan maupun program memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Perlunya Mempertahankan Keberlanjutan Anggaran dan Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan

Sebagai suatu lembaga vertikal, penganggaran BBTNLL utamanya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mekanisme tersebut maka lembaga ini sepenuhnya



bergantung kepada kemampuan keuangan negara. Dengan demikian penganggaran tahun fiskal berikutnya bergantung pada usulan anggaran tahun berjalan. Sebab itu maka terdapat margin ketidakpastian tentang anggaran yang akan diperoleh pada tahun berikutnya. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dana dari para pihak melalui mekanisme kolaborasi.

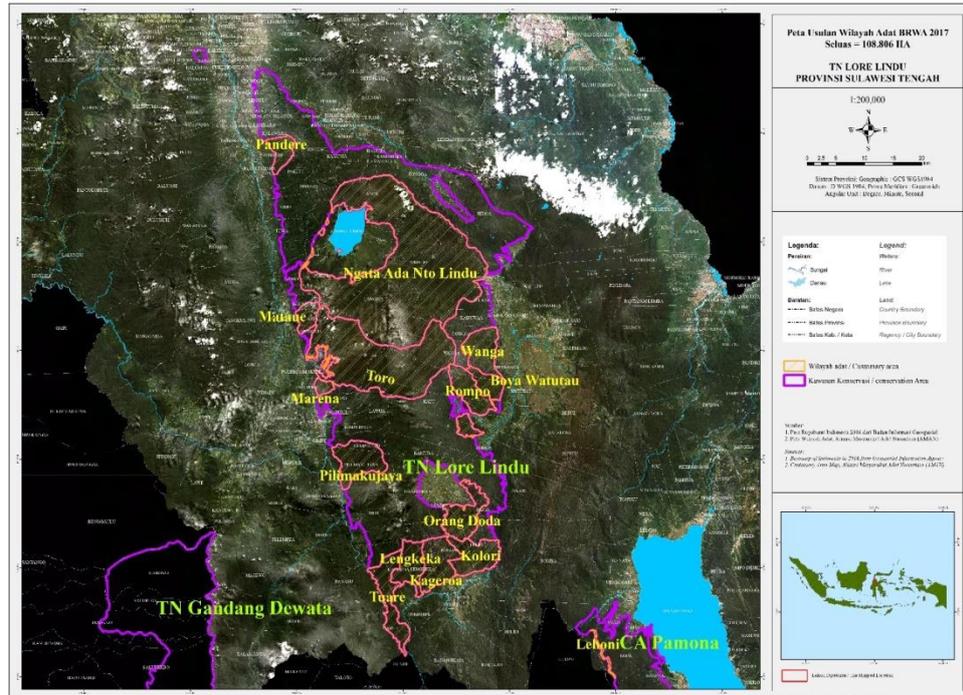
### 3. Isu-Isu Strategis Terkait Kawasan

- **Hutan adat**

Dalam perkembangannya, Taman Nasional Lore Lindu saat ini terdapat usulan hutan adat dengan total luas 108.806,03 Ha atau 50,4 % dari luas TNLL. Usulan wilayah adat tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Usulan Hutan Adat di TNLL

No	Wilayah Adat	Luas Wilayah Adat (Ha)	%
1	Marena	683,97	0,63
2	Mataue	1.473,54	1,35
3	Ngata Ada Nto Lindu	48.057,30	44,17
4	Toro	22.110,86	20,32
5	Boya Watutau	1.943,75	1,79
6	Orang Doda	4.066,53	3,74
7	Rompo	4.301,40	3,95
8	Wanga	3.697,31	3,40
9	Pandere	1.864,93	1,71
10	Kageroa	3.237,48	2,98
11	Lengkeka	4.451,55	4,09
12	Tuare	4.337,31	3,99
13	Kolori	4.048,77	3,72
14	Pilimakujaya	4.531,34	4,16
	Jumlah	108.806,03	100,00



**Gambar 3.** Peta usulan hutan adat di TNLL

Terkait dengan adanya usulan wilayah adat, BBTNLL melakukan koordinasi ke beberapa komunitas adat dan *stakeholder* terkait. Diketahui bahwa komunitas adat memiliki pengelolaan/ pembagian ruang sesuai dengan peruntukannya. Tiga dari komunitas adat memiliki penggunaan lahan yang jika dikelompokkan hampir sama dengan kriteria-kriteria zonasi TNLL. Melalui revisi zonasi, BBTNLL mencoba melakukan penyamaan pengelolaan ruang adat dengan sistem zonasi yang juga diverifikasi melalui penutupan lahan. Penyamaan ruang tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Penyesuaian antara pengelolaan ruang wilayah adat dengan revisi zonasi TNLL 2018

No	Wilayah Adat	Tata Guna Lahan	Keterangan	Penyesuaian revisi zonasi
1	LINDU	Bondea	Area yang bisa digarap masyarakat merupakan tempat di mana masyarakat boleh menanam tanaman produktif, seperti kopi, cokelat, atau bambu	Tradisional
		Pampa	Kebun tempat menanam ubi jalar, pisang, jagung atau tanaman palawija	Zona Tradisional
		Lida	Area persawahan	Zona Khusus



No	Wilayah Adat	Tata Guna Lahan	Keterangan	Penyesuaian revisi zonasi
		Pangale	Wilayah di mana dahulu para leluhur masyarakat Lindu pernah menggarapnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya dibiarkan menghutan kembali(oma)	Zona Rimba
		Talinti	Pinggir danau	
		Lambara	Lokasi penggembalaan hewan	Zona Tradisional
		Wanangkiki	Hutan Rimba	Zona Inti
		Ngurah	Bekas kebun	Zona Rimba
2	<b>TORO</b>	Wana Ngkiki	Wana Ngkiki, yaitu kawasan hutan primer di puncak gunung yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber udara segar (winara), dan tidak boleh dijamah aktivitas manusia. Dalam kawasan Wana Ngkiki ini tidak terdapat hak	Zona Inti
		Wana	Wana, yaitu hutan primer di sebelah bawah Wana ngkiki yang merupakan habitat hewan dan tumbuhan langka, dan sebagai kawasan tangkapan air. Dilarang membuka lahan pertanian karena bisa menimbulkan bencana	Zona Rimba
		Pangale	Pangale, yaitu kawasan hutan semi-primer yang dulu sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali.	Zona Rimba
		Polidaa	Areal Persawahan	Zona Khusus
		Oma	Oma yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir	Zona Trdisional
3	<b>MARENA</b>	Wana	hutan lebat yang berada kurang lebih 5 Km dari pemukiman penduduk. Wana diyakini adalah hutan yang memberi penghidupan bagi masyarakat dan harus dijaga kelestariannya	Zona Rimba
		Pangale	Areal hutan yang pernah dijadikan ladang	Zona Rimba
		Oma	Areal perladangan gilir balik	Zona Trdisional

- **Kebutuhan energi terbarukan**

Seiring dengan berkurangnya cadangan energi bersumber fosil, kebutuhan energi terbarukan akan semakin meningkat. Kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah terus meningkat. Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam jaringan Sistem Sulbagut (Sulawesi bagian utara). Untuk



memenuhi kebutuhan energi di Sistem Sulbagut hingga tahun 2028 akan dibangun PLTA dan PLTS sebesar 121 MW.

Potensi sumber energi terbarukan dari kawasan TNLL antara lain panas bumi dan energi air. Kawasan TNLL merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lariang dan Palu yang di dalamnya mengalir sekitar 263 Jaringan Sungai. Sungai Lariang dan Sungai Gumbasa merupakan dua sungai besar yang mengalir di dalam kawasan TNLL yang berpotensi digunakan untuk minihidro dan mikrohidro. Saat ini sudah terdapat beberapa pihak swasta yang sedang melakukan survey kelayakan dan dalam proses perizinan untuk membangun pembangkit listrik dari Sungai yang melewati Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

- **Kemitraan konservasi**

Desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu sebanyak 71 desa. Sebagian besar masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan kawasan TNLL untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bentuk interaksi masyarakat dengan kawasan TNLL perlu diatur secara formal dan diberi fasilitasi ruang kelola di zona tradisional. Untuk tujuan tersebut dikembangkan kelembagaan lokal yang diberi nama Kemitraan Konservasi Masyarakat (KKM). Target implementasi KKM sebanyak 56 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Tujuan dari KKM adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi dan tata kelola kawasan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Memberikan akses masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di zona tradisional.

- **Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan**

Program-program pembangunan di sekitar dan dalam Taman Nasional adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Berkembangnya masyarakat di sekitar taman nasional diikuti dengan beberapa pembangunan sarana prasarana untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait



pembangunan strategis melalui Perpres No.3/2016 Jis. No.58/2017, No.56/2018. Kebijakan pembangunan di dalam kawasan konservasi ini telah diatur melalui Permenhut P.85/2014, Permen LHK P.44/2017. Kawasan TNLL merupakan salah satu kawasan konservasi yang terdapat beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain:

- a. Rencana peningkatan jalan eksisting dan pembangunan jalan baru yang menjadi akses masyarakat
- b. Rencana pembangunan PLTA, Mikrohidro, dan minihidro.
- c. Rencana pemasangan menara telekomunikasi dan jaringan listrik dan lainnya
- d. Menara pengamatan cuaca (stasiun GAW)

- **Peluang *Carbon trade***

Berdasarkan laporan PT SAMAGATA tahun 2019, TNLL memiliki laju deforestasi dan degradasi hutan yang relatif rendah. Oleh karena itu TNLL diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi nasional yang tertuang di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) di sektor kehutanan.

Terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks* telah memberikan ruang bagi peran konservasi untuk mendapatkan insentif atas upaya konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan. Oleh karena itu, fokus mitigasi perubahan iklim di hutan konservasi yang umumnya memiliki sejarah laju deforestasi dan degradasi hutan yang relatif rendah perlu diarahkan pada upaya merepresentasikan peran konservasi, dimana memelihara dan/atau meningkatkan stok karbon di hutan kawasan konservasi berarti menjamin keberlangsungan jasa lingkungan biodiversitas flora dan fauna, ketersediaan jasa lingkungan air termasuk perlindungan daerah aliran sungai/*watershed*



*management*, keindahan dan fenomena alam (wisata alam) di dalamnya. Sebagai upaya merealisasikan pengelolaan jasa lingkungan karbon dan pelestarian REDD+ di taman nasional, perlu dilakukan upaya melalui integrasi jasa lingkungan ke dalam *stock carbon* berbasis ekosistem di taman nasional khususnya di Taman Nasional Lore Lindu.

#### **4. Kondisi yang Diinginkan**

Kondisi yang diinginkan merupakan kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang akan diwujudkan melalui pengelolaan 10 (sepuluh) tahun ke depan. Kondisi yang diinginkan dari pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu adalah:

- Terjaganya eksistensi kawasan hutan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya untuk memenuhi peran dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan;
- Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem terestrial khas Sulawesi sebagai bagian ekosistem *wallacea*; terjaganya kelangsungan proses-proses ekologi dalam kawasan TNLL yang mendukung sistem penyangga kehidupan dengan penyesuaian pada program pembangunan masyarakat didalam/di sekitar kawasan TNLL;
- Terlaksankannya kegiatan pengelolaan lestari berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumberdaya alam /keanekaragaman hayati dan sebagai bentuk solusi permasalahan pengelolaan kawasan konservasi dan solusi permasalahan masyarakat yang ada didalam/disekitar kawasan TNLL;
- Terwujudnya dukungan kegiatan pendidikan dan penelitian; terjaganya kelangsungan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/keanekaragaman hayati kawasan TNLL dan sekitarnya, khususnya bagi kepentingan masyarakat setempat tanpa mengganggu kelestariannya;



- Terwujudnya pengembangan potensi sumber daya alam/keanekaragaman hayati beserta keindahan dan keunikan ekosistem alam serta sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat di sekitarnya yang tidak saja mampu meningkatkan keberhasilan program kepariwisataan di kawasan ini, tetapi juga mampu meningkatkan sumber penghasilan masyarakat setempat sebagai alternatif pendapatan.

## II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGELOLAAN

# RPJP

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
TAHUN 2016-2025



Sikatan mugimaki (*Ficedula mugimaki*)



### Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile  
(0451) 457623 – 429270



## II. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGELOLAAN

### A. VISI

Visi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu adalah “Terwujudnya sistem penyangga kehidupan dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian dari ekosistem terrestrial Wallacea untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat”. Visi ini mencakup berbagai aspek terkait eksistensi kawasan TNLL sebagai kawasan konservasi, karakteristik ekosistem spesifik wallacea dengan segala potensi sumber daya alam yang dikandungnya, pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat, dan konsep pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan.

Sistem Penyangga Kehidupan dalam arti fungsi TNLL akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan konservasi yang menyangga kehidupan segala makhluk hidup yang ada didalam maupun di sekitar kawasan taman nasional baik kehidupan manusia, flora, dan fauna beserta alam lingkungannya sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaannya. Dengan demikian pengelolaan TNLL dapat diselenggarakan secara optimal sesuai potensi sumberdaya, fungsi dan peruntukkan kawasan serta mampu berperan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas baik lokal, nasional, regional, maupun dunia internasional.

Pusat Konservasi KEHATI beserta Ekosistem dalam arti bahwa fungsi dan tujuan konservasi baik perlindungan, pengawetan maupun pemanfaatan dapat berjalan secara seimbang, seiring dan berkelanjutan untuk generasi sekarang maupun yang akan datang (inter dan antar generasi) yang berbasis pada potensi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dengan segala permasalahan yang ada didalamnya. TNLL berperan sebagai salah satu pusat pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem asli/khas dari ekosistem terrestrial wallacea.



KEHATI beserta Ekosistem Terrestrial Wallacea dalam arti bahwa potensi sumber daya alam dan karakteristik ekosistem kawasan hutan daratan Sulawesi dapat dikelola dan dipertahankan sebagai contoh eksistensi ekosistem terestrial wallacea yang asli dan dalam kondisi baik. Eksistensi ekosistem ini tercermin pada karakteristik potensi kekayaan keanekaragaman hayati flora fauna dan ekosistem yang terkandung didalam kawasan TNLL yang tiada duanya di muka bumi karena posisi geografisnya sebagai suatu ekosistem kawasan yang terletak diantara dua garis Wallace.

## **B. MISI**

Misi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu adalah sebagai berikut:

1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya alam.
4. Mewujudkan pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

## **C. TUJUAN**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu adalah:

1. Terjaganya eksistensi kawasan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL.
3. Terwujudnya pengembangan potensi jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat



4. Terlaksanakannya kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung pengelolaan TNLL.
5. Terwujudnya pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Visi misi dan tujuan pengelolaan dikemas dalam rencana pengelolaan yang dijabarkan dalam bentuk rencana pengelolaan kawasan sehingga tercapai suatu kondisi yang diharapkan antara lain adalah:

1. Terjaga dan terlindunginya kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan segala fungsi yang melekat sebagai kawasan konservasi;
2. Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem khas Sulawesi sebagai bagian dari ekosistem terrestrial wallacea;
3. Pengelola BBTNLL memiliki kapasitas untuk mengelola seluruh potensi sumber daya alam/keanekaragaman hayati dari kawasan taman nasional dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya;
4. Potensi sumber daya alam/keanekaragaman hayati dan potensi kawasan TNLL dapat dimanfaatkan secara optimal;
5. Fungsi, peran, dan manfaat dari keberadaan TNLL dapat dirasakan oleh para pihak khususnya bagi masyarakat didalam dan disekitar kawasan TNLL yang terjamin hak dan kewajibannya;
6. Kawasan taman nasional yang terdegradasi dapat direstorasi;
7. Populasi spesies flora fauna penting dan dilindungi dapat terjaga dan dikendalikan pada tingkat yang menjamin kelestariannya;
8. Hasil pemanfaatan dan pengembangan spesies bernilai ekonomi penting dapat mendukung penghidupan masyarakat;
9. Pengusahaan ekowisata dan jasa lingkungan yang mencirikan nilai khas TNLL dapat dikelola secara profesional dan memenuhi standar yang diakui;



10. Pembagian keuntungan yang adil dari hasil usaha wisata alam dan jasa lingkungan memberikan manfaat bagi pengelola, masyarakat di dalam/sekitar TNLL dan bagi pembangunan wilayah;
11. Hasil-hasil penelitian di TNLL digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan kawasan konservasi dan untuk pendidikan konservasi bagi masyarakat; dan
12. Terbangunnya pangkalan data yang handal dan terpercaya serta terbangunnya sistem informasi pengelolaan yang berfungsi sebagai basis pengambilan keputusan pengelolaan TNLL dan peningkatan pelayanan publik.

**III. ZONASI TAMAN NASIONAL LORE  
LINDU**

# RPJP

**RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
TAHUN 2016-2025**



*Maleo (Macrocephalon maleo)*



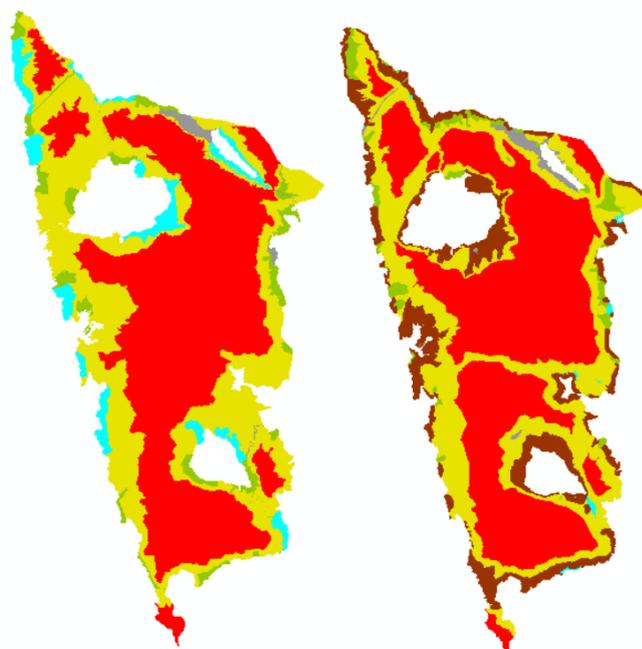
**Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu**

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile  
(0451) 457623 – 429270



### III. ZONASI TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Revisi Zonasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Surat Keputusan Nomor SK. 456/KSDAE/SET/KSA.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Di dalam dokumen Zonasi TNLL Tahun 2018 termuat 6 (enam) zonasi, yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona Rehabilitasi, Zona Tradisional dan Zona Khusus. Secara umum kegiatan revisi zona TNLL di tahun 2018 bertujuan untuk mengakomodir ruang kelola berupa: (1) menyinergikan konsep ruang menurut adat ke dalam pengelolaan taman nasional; (2) pemanfaatan masyarakat lokal dan pemanfaatan jasa lingkungan; (3) Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan; (4) penyesuaian terhadap kondisi penutupan lahan terbaru; (5) mengakomodir ruang kemitraan konservasi dengan masyarakat lokal; (6) adanya kebijakan baru terkait batas TNLL.



Zonasi Tahun 2015      Zonasi Tahun 2018

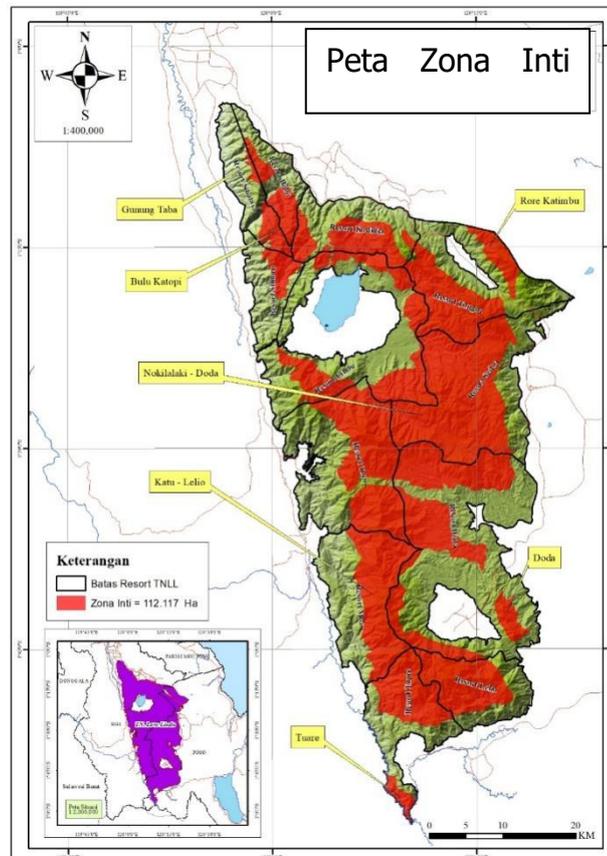
No	Zona	Zonasi 2015		Zonasi 2018	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Zona Inti	111.659,3	51,8	112.117	52,0
2	Zona Rimba	82.135,4	38,1	65.441,7	30,3
3	Zona Pemanfaatan	9.957,2	4,6	8.314,4	3,9
4	Zona Rehabilitasi	10.161,9	4,7	911,7	0,4
5	Zona Khusus	1.820,0	0,8	3.719,2	1,7
6	Zona Tradisional	-	-	25.229,6	11,7
Total (Ha)		215.733,7	100,0	215.733,7	100,0

**Gambar 4.** Zonasi Taman Nasional Lore Lindu 2015 dan 2018



## A. ZONA INTI

Zona inti adalah bagian taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.



**Gambar 5.** Zona Inti Taman Nasional Lore Lindu

Zona inti TNNL meliputi puncak-puncak gunung Lemolangga, Taba, dan Saluaga di bagian utara di sekitar lembah Palu, di bagian palolo bagian barat meliputi puncak-puncak gunung Gumbasa, Katopi dan sebagian Kanawu. Bagian Palolo memanjang ke Selatan sampai lembah Napu dan Kulawi meliputi puncak-puncak gunung: Taba, Saluaga, Katopi, Gumbasa, Watubose, Towingkole, Rorema, Tamuela, Tokosa, Taweki, Lantawungu, Haloumanaseli, Bomba, Kinanau, Tunawu, Kalumea, Jara, Mungu, Rorekatimbu, Malindo, Halubeka, Potowonoa, Hampulo, Pili, Tokepangana, Moa, Hampulo, Malemo, Talutu, Bubulani, Molalawa,



Wantua, Pointoa, Sepe, Betaua, Pawuli, Engkeleo, Karia, Popotondoa, dan Baleala . Zona ini terdiri dari 7 bagian yang tersebar dari utara ke selatan dengan luas sekitar 112.117 Ha atau 52 % dari luas TNLL. Selain dari puncak gunung, zona inti juga tersusun dari ruang adat masyarakat Lindu, Toro dan Marena berupa ruang wanangkiki.

Fauna yang terdapat di zona inti TNLL antara lain dari jenis mamalia besar seperti Anoa, Babi Hutan, Babi Rusa dan Monyet Hitam Sulawesi yang tersebar di beberapa tempat pada zona ini. Terdapat dua jenis Anoa yaitu Anoa Dataran rendah (*Bubalus depressicornis*) dan Anoa Pegunungan (*B. quarlesi*) yang masih mudah ditemukan di bagian tengah TNLL baik di zona inti maupun di zona rimba.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam zona inti antara lain:

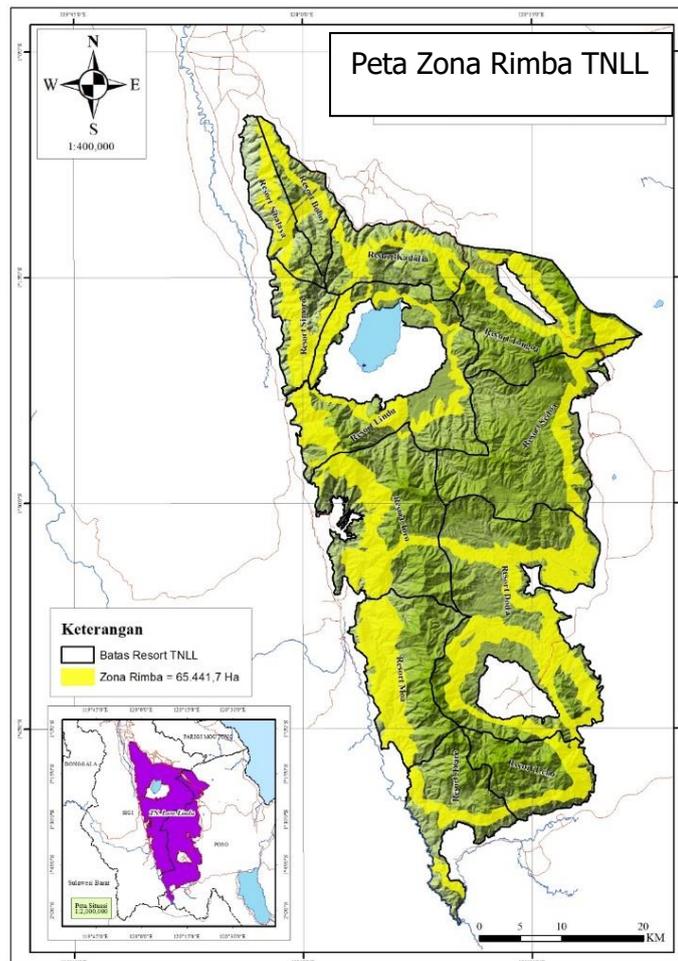
1. Patroli Pengamanan kawasan bersama parapihak/masyarakat
2. Patroli pecegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat
3. Penyiapan demplot lokasi untuk pengukuran *stock carbon*
4. Pembinaan spesies indikator dan habitatnya
5. Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar
6. Penyusunan *baseline* spesies prioritas TNLL
7. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
8. Pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam pada area kerusakan
9. Pembuatan model konservasi spesies dan habitatnya

## **B. ZONA RIMBA**

Zona rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona rimba TNLL memiliki kondisi alam baik fisik dan biotanya masih asli sebagian besar belum diganggu oleh manusia. Zona yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) ini merupakan satu-satunya zona yang terbentang dari Utara ke Selatan meliputi wilayah dari puncak-puncak gunung utama seperti gunung Watubose, Saluaga, Taba, Towingkole, Towingrindi, Watukeu, Matantimali, Watureo, Mangkuho, Topolo, Bobe, Padabangi, Banga, Malindo, Kaliako, Tutu



Karue, Engkeleo, Popotondoa, Wantu, Wongkala, Atuloi, Maroro, Tanumundu, Tongoa dan Haluwahe dengan luas sekitar 65.441,7 Ha atau 30,3 % dari luas TNLL. Zona rimba juga berasal dari pengelolaan ruang adat *wana* dan *pangale*.



**Gambar 6.** Zona Rimba Taman Nasional Lore Lindu

Zona ini terdiri dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan rendah dengan ketinggian dari 300 sampai 1.800 mdpl dengan memiliki variasi iklim D1, C1, E1 dan E2 sesuai dengan system klasifikasi iklim Oldemand. Hal ini menunjukkan faktor iklim yang berpengaruh di zona ini sangat bervariasi dari curah hujan < 1.000 mm sampai 2.500 mm setiap tahun.

Zona ini juga terbentuk dari beberapa variasi land system seperti Danau Lindu (DLU), Kototinggi (KTT), Bukit Baringin (BBR), Telawi (TWI), Bukit Pandan (BPD), Bukit Balang (BBG), Pendreh (PDH), Batang Anai



(BGA), Salo Saluwau (SSU) namun dengan luasan yang relatif lebih kecil di bandingkan dengan geologi dan land system di wilayah zona inti..

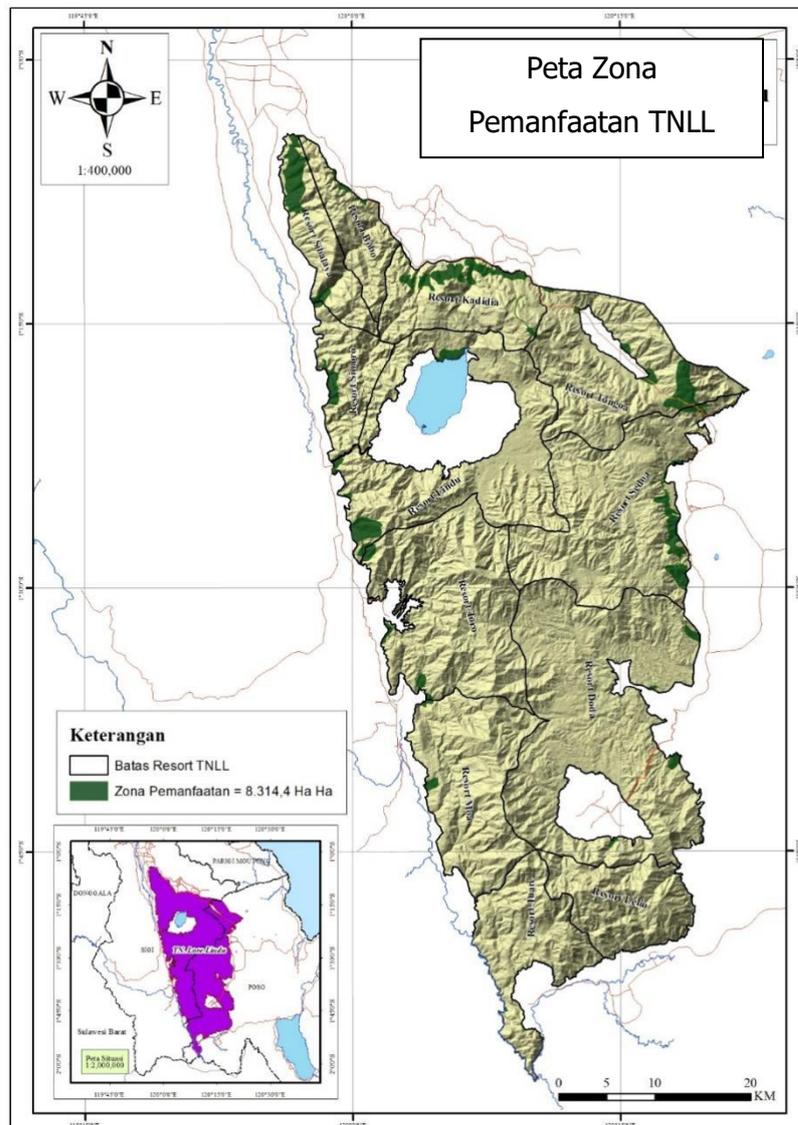
Fauna yang terdapat di zona inti TNLL juga terdapat di wilayah zona rimba baik mamalia besar maupun satwa lainnya tersebar di wilayah ini namun dalam jumlah yang sangat terbatas mengingat sebagian kecil zona ini telah diganggu oleh manusia.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam zona rimba antara lain:

1. Patroli Pengamanan kawasan bersama para pihak/masyarakat
2. Patroli pecegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat
3. Penyiapan Demplot lokasi untuk pengukuran stock carbon
4. Pembinaan spesies indikator dan habitatnya
5. Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar
6. Penyusunan *base line* spesies prioritas TNLL
7. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
8. Wisata alam terbatas
9. Pemulihan ekosistem
10. Pembuatan papan peringatan larangan untuk mengganggu satwa yang melakukan perlintasan habitat (*homerange*)
11. Identifikasi tumbuhan pakan satwa liar (spesies indikator)
12. Pembuatan model konservasi spesies dan habitatnya

### **C. ZONA PEMANFAATAN**

Zona pemanfaatan TNLL adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya seperti pemanfaatan massa air, energi air, energi panas bumi, dan energi angin. Secara keseluruhan zona pemanfaatan ini memiliki luas sekitar 8.314,4 Ha atau 3,9 % dari luas TNLL.



**Gambar 7.** Zona Pemanfaatan Taman Nasional Lore Lindu

Lokasi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan wisata seperti sumber air panas di Kadidia, Danau Tambing, jalan perlintasan tradisional dari Lelio ke Doda, jalan perlintasan tradisional dari Tuare ke Moa, air terjun di Desa Kolori dan sebagainya. Lokasi yang telah dimanfaatkan untuk keperluan pemanfaatan jasa lingkungan air berupa massa air, energi air terdapat di lokasi sekitar desa-desa Tuare, Lelio, Doda, Hanggira, Bariri, Baliura, Lempe, Torire, Katu, Talabosa, Wuasa, Watumaeta, Wanga dan Siliwanga. Sedangkan yang berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air lokasinya terdapat di Desa Tuare dan Desa Pakuli.

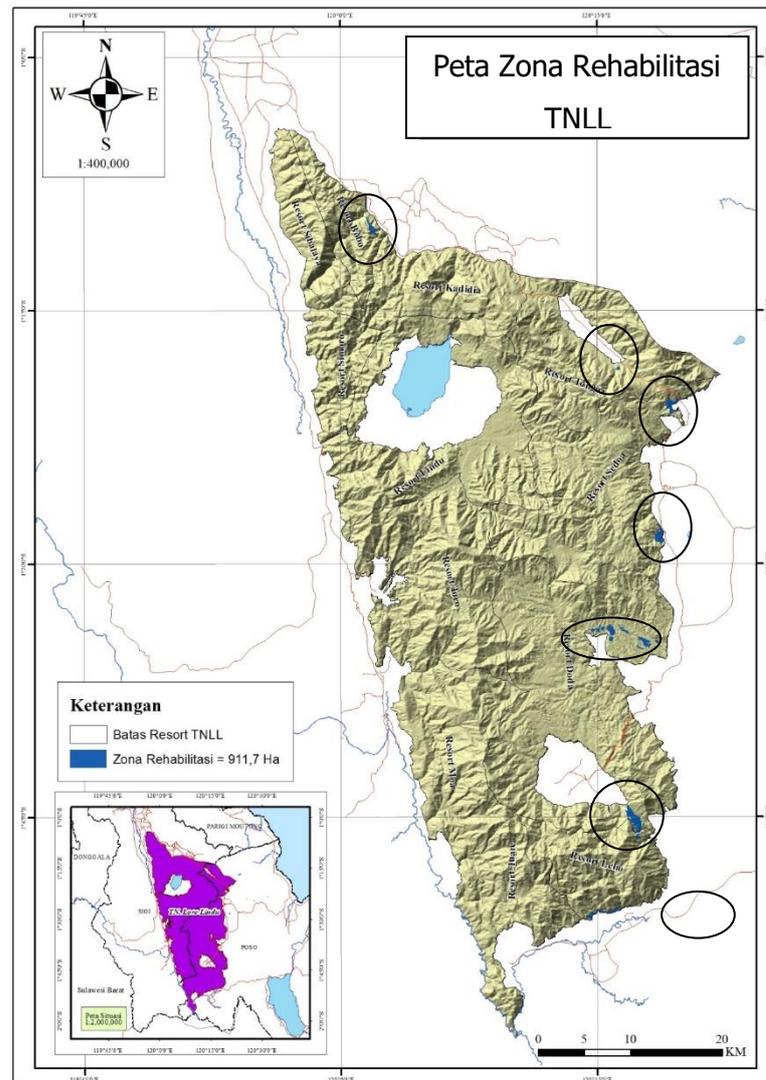


Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam zona pemanfaatan antara lain:

1. Patroli Pengamanan kawasan bersama para pihak/masyarakat
2. Patroli pencegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat
3. Penyiapan Demplot Lokasi untuk pengukuran stock carbon
4. Pembinaan spesies indikator dan habitatnya
5. Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar
6. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
7. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam
8. Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, massa air, energi air, energi panas dan energi angin
9. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas
10. Inventarisasi potensi air dan energi air
11. Pemulihan ekosistem
12. Pembinaan populasi semi alami / pelestarian spesies indikator
13. Pembangunan fasilitas wisata air panas
14. Fasilitasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi
15. Fasilitasi pengembangan obyek wisata budaya dan situs megalith

#### **D. ZONA REHABILITASI**

Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena kondisi alamnya telah mengalami kerusakan ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya.



**Gambar 8.** Zona Rehabilitasi Taman Nasional Lore Lindu

Zona ini terdapat di beberapa lokasi yang tersebar di sekitar batas dengan luas sekitar 911,7 Ha atau 0,4 % dari luas TNLL disamping beberapa kerusakan yang relatif kecil berupa spot-spot di sepanjang batas dengan desa-desa di sekitar wilayah konservasi ini. Zona ini memiliki ketinggian 300 sampai 900 mdpl. Lokasi zona rehabilitasi disajikan pada Tabel 26. Pada umumnya kerusakan kawasan di desa-desa tersebut disebabkan oleh aktifitas manusia berupa penebangan liar dan perambahan hutan, namun di beberapa lokasi terjadi kerusakan akibat kebakaran hutan dan longsor akibat gempa.

Vegetasi zona rehabilitasi umumnya telah mengalami kerusakan akibat pemungutan hasil hutan, perburuan dan perubahan fungsi hutan



menjadi pemukiman atau perkebunan. Tingkat kerusakan yang terjadi bervariasi sesuai dengan pola pemanfaatannya. Areal yang dirubah fungsinya menjadi pemukiman dan perkebunan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan pemanfaatan untuk pengambilan hasil hutan sesuai kebutuhan untuk kayu bakar atau bangunan rumah.

Untuk lokasi Kolori, Dodolo dan Sedoa yang merupakan lokasi yang positif ditemukannya cacing *schistomiasis* akan dilakukan eradikasi untuk menekan penyebaran penyakit ini melalui pemulihan ekosistem di sekitar lokasi positif *schistomiasis*.

Kegiatan yang akan dilakukan pada zona rehabilitasi antara lain:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas
2. Patroli Pengamanan kawasan bersama parapihak/masyarakat
3. Patroli pencegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat
4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
5. Pemulihan ekosistem
6. Penanggulangan fokus schistosomiasis

## **E. ZONA TRADISIONAL**

Zona tradisional merupakan bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Kawasan TNLL memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi. masyarakat adat yang tinggal di sekitar TNLL sudah melakukan berbagai aktivitas di dalam kawasan TNLL untuk memenuhi beragam kebutuhannya, yaitu: pangan (budi daya tradisional), kayu bakar dan kayu pertukangan. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat dengan menerapkan kearifan lokal yang berlaku pada masing-masing komunitas adat. Kondisi tersebut telah mengakar dalam budaya masyarakat, sehingga masyarakat tetap beraktivitas di dalam kawasan walaupun telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional pada tahun 1999.





Terbitnya Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam memayungi praktik pelibatan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional dan akses terhadap HHBK. Akses memanfaatkan HHBK sesuai dengan Pemberian akses melalui penetapan zona tradisional ini dimaksudkan untuk mengakomodir masyarakat di desa penyangga yang telah memiliki kebun di dalam kawasan TNLL dan masyarakat yang telah memiliki tata kelola hutan berdasarkan kearifan lokalnya. Selain itu pemberian zona tradisional ini juga untuk mengakomodir rencana implementasi KKM (kemitraan konservasi) pada desa-desa yang menjadi sasaran proyek EPASS (*Enhancing Protected Area System in Sulawesi*) dan FP III (*Forest Programme III*).

Taman Nasional Lore Lindu berbatasan langsung dengan 71 (tujuh puluh satu) desa. Setiap desa telah dialokasikan zona tradisional sebagai ruang kemitraan konservasi.

**Tabel 9.** Desa Penyangga di Taman Nasional Lore Lindu

No	Desa	Z. Tradisional (HA)	No	Desa	Z. Tradisional (HA)
1	Kalawara	566,30	13	Sungku	743,20
2	Omu	315,60	14	Toro	2.355,70
3	Pakuli	10,90	15	Gimpu	203,10
4	Pakuli Utara	63,50	16	Lawua	18,80
5	Pandere	313,70	17	Lempelero	0,10
6	Simoro	166,80	18	Moa	227,50
7	Tuwa	88,40	19	O'o	431,20
8	Bolapapu	72,90	20	Pili Makujawa	164,60
9	Marena	395,30	21	Tompi Bugis	65,80
10	Mataue	40,80	22	Watukilo	58,10
11	Namo	194,80	23	Anca	588,10
12	Salua	364,30	24	Langko	1.581,00
25	Olu	72,50	48	Sibowi	87,00
26	Puro'o	170,20	49	Kageroa	208,80
27	Tomado	2.230,60	50	Kolori	490,90
28	Bulili	208,60	51	Lelio	637,80
29	Kadidia	45,30	52	Lengkeka	898,10
30	Kamarora A	26,10	53	Tuare	1.635,00
31	Kamarora B	12,40	54	Betue	161,50
32	Sopu	25,20	55	Siliwanga	78,50
33	Baku-Bakulu	56,60	56	Talabosa	13,00



No	Desa	Z. Tradisional (HA)	No	Desa	Z. Tradisional (HA)
34	Bobo	278,30	57	Wanga	203,80
35	Bunga	149,70	58	Watutau	294,30
36	Kapiroe	200,60	59	Baliura	1.602,50
37	Karunia	298,80	60	Bariri	895,10
38	Lemban Tongoa	32,70	61	Doda	370,70
39	Sigimpu	112,50	62	Hanggira	1,104,30
40	Sintuwu	541,80	63	Katu	674,50
41	Tongoa	266,60	64	Lempe	32,60
42	Bora	16,50	65	Rompo	57,90
43	Sidondo I	201,00	66	Torire	200,10
44	Sidondo Iii	33,40	67	Dodolo	14,90
45	Lambara	208,00	68	Kaduwaa	41,30
46	Sibalaya Selatan	140,70	69	Sedo	736,20
47	Sibalaya Utara	1,70	70	Watumaeta	196,70
			71	Wuasa	211,40
<b>Luas Zona Tradisional (Ha)</b>					<b>25.227,20</b>

Catatan: Sampai dengan Tahun 2020, BBTNLL telah menandatangani PKS Kemitraan Konservasi dengan 36 desa di sekitarnya. Target PKS Kemitraan Konservasi BBTNLL sampai dengan tahun 2021 adalah 56 desa.

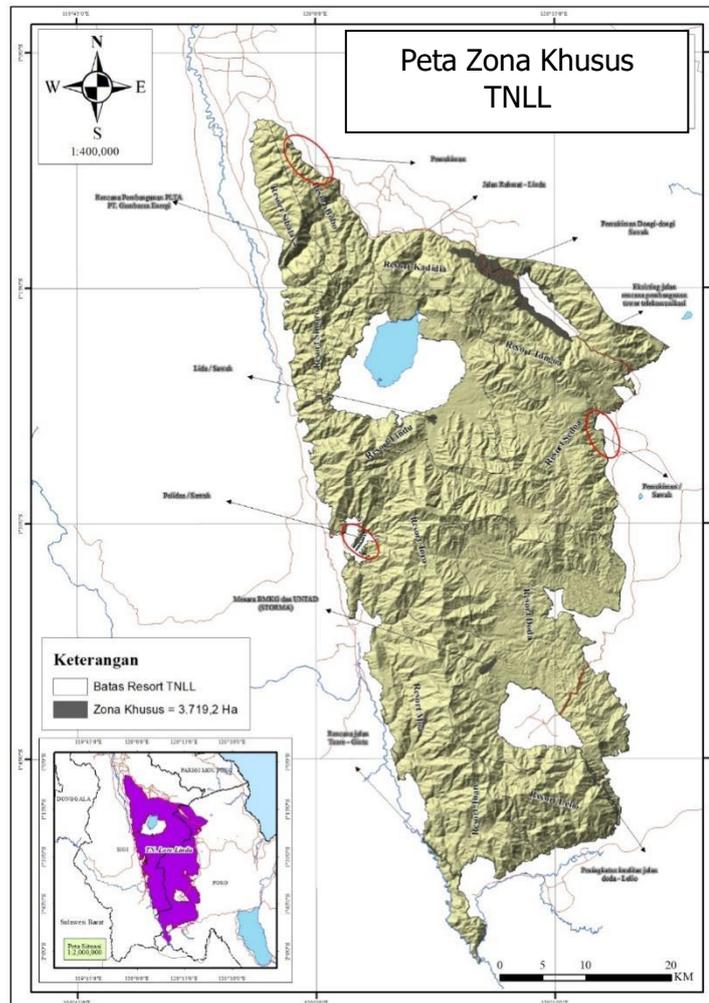
Kegiatan yang akan dilakukan pada zona tradisional meliputi:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas
2. Patroli Pengamanan kawasan bersama parapihak/masyarakat
3. Patroli pencegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat
4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
5. Pemulihan ekosistem
6. Penanggulangan fokus schistosomiasis
7. Fasilitasi Pengembangan usaha produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat
8. Inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu
9. Pengembangan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK)
10. Sosialisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK)
11. Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di zona tradisional



## F. ZONA KHUSUS

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.



**Gambar 10.** Peta Zona Khusus Taman Nasional Lore Lindu

Pada lokasi ini sudah terdapat fasilitas umum berupa jaringan listrik, jalan yang permanen dan beraspal serta dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan selama ini dimanfaatkan sebagai aksesibilitas masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan kabupaten Poso dan kabupaten Sigi, Pada lokasi ini



juga terdapat rencana pembangunan strategis yang tidak terelakkan antara lain:

1. Jalan akses masyarakat Desa Doda ke Lelio (telah ber PKS dengan Pemda Poso).
2. Pembangunan jalan Tuare – Gintu.
3. Rencana pembangunan PLTA oleh pihak swasta di Gumbassa.
4. Rencana pemasangan menara telekomunikasi di Desa Sedoa (Pembangunan telah selesai, telah ber PKS dengan PT. Telkomsel).
5. Jalan-jalan existing dalam TNLL.
6. Pemanfaatan menara pengamatan cuaca eks STORMA dan Stasiun *Global Atmosphere Watch* di Desa Hanggira Kecamatan Lore Tengah (Pembangunan telah selesai, telah ber PKS dengan BMKG).

Rencana pembangunan strategis tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis yang tidak terelakkan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NOMOR: P,85/Menhut-II/2014, Jo, Permenlhk NOMOR P,44/MENLHK/SETJEN/KUM,1/6/2017, Selain bebrapa hal di atas, zona khusus juga mengakomodir persawahan masyarakat dalam TNLL dan pemukiman existing, Persawahan masyarakat khususnya masyarakat adat Toro dan Lindu digolongkan dalam pengelolaan ruang *polidaa* atau *lida*, Kegiatan yang akan dilakukan pada Zona Khusus meliputi:

1. Patroli Pengamanan kawasan bersama parapihak/masyarakat
2. Patroli pencegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat
3. Pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi
4. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
5. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
6. Fasilitasi Pengembangan usaha produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat
7. Inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu



8. Pengembangan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK)
9. Sosialisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK)
10. Fasilitasi Kerja sama Pembangunan jalan wisata patroli /jalan setapak akses budaya Doda-Lelio.
11. Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan jalan Kamarora-Dongi-Dongi dan Dongi-Dongi –Sedoa dan Torire-Bariri sebagai jalan umum/jalan wisata
12. Fasilitasi kerja sama pengelolaan jaringan listrik Bariri-Torire untuk menunjang objek wisata situs megalit
13. Fasilitasi kerja sama pembangunan menara telekomunikasi PT. Telkomsel.
14. Fasilitasi kerja sama pemanfaatan menara pengamatan cuaca eks STORMA dan Stasiun *Global Atmosphere Watch* di Desa Hanggira Kecamatan Lore Tengah (Pembangunan telah selesai, telah ber PKS dengan BMKG)
15. Fasilitasi kerja sama pembangunan *under ground tunnel* PLTA

#### IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

# RPJP

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
TAHUN 2016-2025



Enclave Behoa



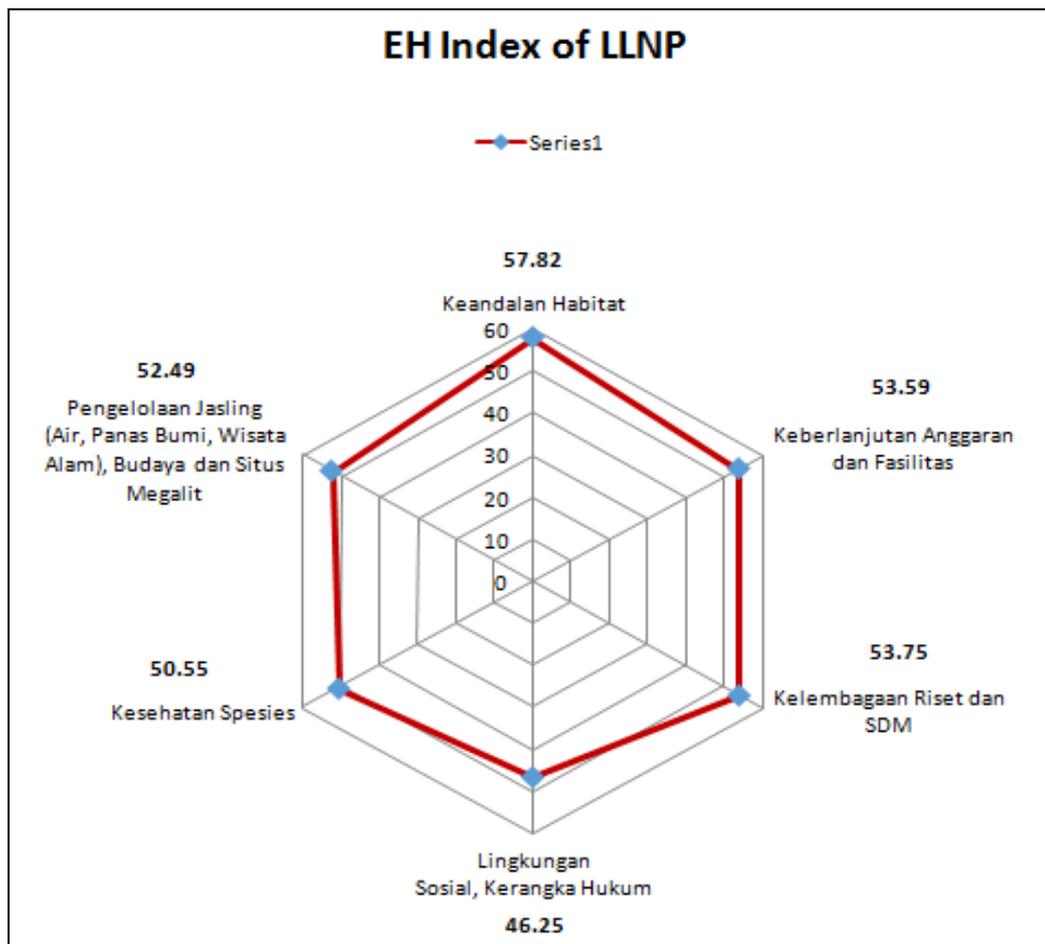
### Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile  
(0451) 457623 – 429270



#### IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Strategi dan rencana aksi disusun berdasarkan hasil analisis keberlanjutan dan analisis *leverage* (unsur pembangkit keberlanjutan) serta analisis Monte Carlo untuk menilai sensitifitas program. Kondisi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu yang didasarkan dari ketiga analisis tersebut, diuraikan pada diagram di bawah ini:



**Gambar 11.** Analisis Monte Carlo tentang Kestabilan Program pada Aspek Prioritas

Berdasarkan diagram di atas (Gambar 11), dapat dirumuskan prioritas masing masing aspek pengelolaan yang akan dijabarkan melalui strategi dan rencana aksi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.



**Tabel 10.** Proyeksi Tingkat Keberlanjutan Sepuluh Tahun Mendatang

<b>No</b>	<b>Aspek Pengelolaan</b>	<b>Tingkat Keberlanjutan Saat ini (%)</b>	<b>Peningkatan Tingkat Keberlanjutan 75 % Sepuluh Tahun Mendatang (%)</b>	<b>Ket.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kesehatan Spesies	57.82	17.18	Prioritas 6
2	Keandalan habitat	53.75	21.25	Prioritas 5
3	Lingkungan, Sosial dan Penegakan Hukum	46.25	28.75	Prioritas 1
4	Pengelolaan Jasling (Air, Panas Bumi, Wisata Alam), Budaya dan Situs Megalit	50.55	24.45	Prioritas 2
5	Kelembagaan, Riset dan Sumber daya Manusia	53.59	21.41	Prioritas 4
6	Kepastian Anggaran, Sarana dan Fasilitas	52.49	22.51	Prioritas 3



**Tabel 11.** Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan TNLL

(x Rp.1.000.000,-)

No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Terwujudnya Sistem Penyangga Kehidupan dan Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati beserta Ekosistem Terrestrial Wallacea untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat	1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea.	2) Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL.	Penurunan jumlah populasi species prioritas;	Pengayaan spesies	1	Penangkaran Semi Alami/Sanctuary/Pengembang biakan spesies target satu unit penangkaran/wilayah	TNLL	1 Unit	-	200	-	280	2.296	3.200	80	85	90	95	APBN dan HLN	6.326
						2	Pembagian lokasi penangkaran berdasarkan spesies	TNLL	1 Lokasi	-	250	250	275	300	325	350	375	400	425	APBN dan HLN	2.950
						3	Pembinaan Populasi	TNLL	12 resor t	487	536	562	591	620	651	684	718	754	791	APBN dan HLN	6.394
						4	Pembinaan Habitat	TNLL	12 resor t	594	653	686	720	756	794	834	876	919	965	APBN dan HLN	7.797
						5	Survey keberadaan spesies AIS di setiap wiyah/tahun	TNLL	12 resor t	-	-	-	-	-	-	320	-	350	-	APBN dan HLN	670
						6	Aksi lapangan pemusnahan spesies AIS	TNLL	12 resor t	-	-	-	-	-	-	-	430	435	450	APBN dan HLN	1.315
2				Gangguan terhadap flora fauna;	Peningkatan kualitas dan integritas lingkungan hutan TNLL	7	Penyuluhan tentang dampak pengambilan spesies secara illegal	TNLL	12 resor t	288	288	-	331	-	613	-	643	-	676	APBN	2.839
						8	Pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah	TNLL	12 resor t	-	216	238	249	262	275	289	303	318	334	APBN dan HLN	2.484
						9	Pembuatan papan peringatan larangan untuk mengganggu satwa yang melakukan pelintasan habitat ( <i>homerange</i> )	TNLL	12 resor t	260	-	-	273	-	-	382	-	-	-	APBN	915
						10	Inventarisasi flora dan fauna	TNLL	12 resor t	300	300	330	347	364	382	401	421	442	464	APBN dan	3.751



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					dan integritas KEHATI			t										HLN				
						11	Monitoring spesies jangka panjang (1 x per 5 tahun)	TNLL	12 resor t	-	-	-	-	360	-	-	-	-	396	APBN dan HLN	756	
						12	Monitoring spesies jangka pendek (tiap tahun) perwilayah	TNLL	12 resor t	360	396	416	437	458	481	505	531	557	585	APBN dan HLN	4.726	
					Pembinaan spesies indikator dan habitatnya	13	Penangkaran semi alami/Pelestarian spesies indikator	TNLL	1 Unit	60	80	144	150	150	150	151	160	180	190	APBN dan HLN	1.415	
						14	Identifikasi homerange spesies indikator	TNLL	12 resor t	-	-	-	-	-	500	520	530	540	540		2.630	
						15	Identifikasi tumbuhan pakan satwa liar (spesies indikator)	TNLL	12 resor t	-	-	576	-	-	620	-	-	650	-	APBN dan HLN	1.846	
						16	Penyuluhan tentang penyadaran masyarakat akan spesies indikator dan habitatnya	TNLL	12 resor t	240	264	277	291	306	321	337	354	371	390	APBN dan HLN	3.151	
3		1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea.	1) Terjaganya eksistensi kawasan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	Terganggunya ekosistem asli dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berdampak pada tidak stabilnya debit sungai, tingginya tingkat erosi dan sedimenta	Pembinaan sumberdaya alam dan lingkungan	17	Identifikasi lahan kritis dan tutupan vegetasi yang rendah	TNLL	1000 Ha	-	-	745	-	750	-	860	-	890	-	APBN dan HLN	3.245	
						18	Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	TNLL	1 Dokumen	-	985	-	-	-	-	1.000	-	-	-	APBN dan HLN	1.985	
						19	Implementasi pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam pada area kerusakan	TNLL	249,7 Ha	-	-	-	430	445	462	480	499	519	440	APBN dan HLN	3.275	
						20	Penanaman pohon atau pengayaan jenis pada area yang mengalami kerusakan	TNLL	819 Ha	-	320	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	APBN dan HLN	8.720



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4		4. Mewujudkan pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	5) Terwujudnya pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Belum tersosialisasinya peraturan perundang dengan baik	Sosialisai Peraturan perundang an	21	Penyuluhan dan Sosialisasi aturan perundang undangan kepada masyarakat	TNLL	12 resor t	480	528	554	582	611	642	674	708	743	780	APBN dan HLN	6.302
						22	Penyuluhan hukum tentang pengambilan spesies	TNLL	12 resor t	-	215	220	230	250	270	275	280	290	300	APBN dan HLN	2.330
						23	Penyuluhan hukum mengenai pelanggaran pal batas	TNLL	12 resor t	-	-	-	-	80	665	-	200	-	-	APBN dan HLN	945
5		1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea.	2) Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL.	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat hukum adat - masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan kawasan	24	Patroli Pengamanan kawasan bersama parapihak/masyarakat	TNLL	12 resor t	788	817	833	949	967	985	904	925	946	968	APBN dan HLN	9.082
						25	Patroli pecegahan dan pemadaman karhut bersama masyarakat.	TNLL	12 resor t	244	258	266	275	283	293	302	312	323	334	APBN dan HLN	2.890
						26	Monitoring dan Evaluasi.	TNLL	12 resor t	288	317	333	349	367	385	404	425	446	468	APBN dan HLN	3.782
		4. Mewujudkan pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun	5. Terwujudnya pengelolaan TNLL yang lebih efektif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan membangun	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat hukum adat -	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan kawasan	27	Pelatihan masyarakat adat tentang metode MONEV kesehatan hutan	TNLL	2 Kegiatan	288	288	288	302	318	333	350	368	386	405	APBN dan HLN	3.326
						28	Penyertaan masyarakat adat dalam kegiatan monitoring dan	TNLL	12 resor t	264	264	290	305	320	336	353	371	389	409	APBN dan HLN	3.301



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	kemitraan dalam tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan		evaluasi kesehatan hutan																
						29	Penyertaan masyarakat adat dalam kegiatan patroli hutan	TNLL	12 resor t	32 4	32 4	34 0	35 7	37 5	39 4	41 4	43 4	45 6	479	APBN dan HLN	3.897	
						30	Dukungan BBTNLL dalam kegiatan adat (festival Danau Lindu, Padungku, dan Mapalus)	TNLL	10 Kegiatan	58 5	58 5	64 4	67 6	70 9	74 5	78 2	82 1	86 2	905	APBN dan HLN	7.314	
						31	Fasilitasi Kemitraan Konservasi Masyarakat (KKM)	TNLL	56 Desa	-	50 0	55 0	57 8	60 6	63 7	66 9	70 2	73 7	774	APBN dan HLN	5.753	
6		1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea.	2) Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL.	Perambahan kawasan masih cukup tinggi;	Pencegahan dan penindakan kasus perambahan kawasan	32	Pemetaan dan Identifikasi Areal Perambahan. (Tipologi & Luas).	TNLL	9423 Ha	-	-	-	45 0	-	50 0	-	52 0	-	530		2.000	
						33	Mendorong Penegakan hukum dan Kearifan Lokal	TNLL	12 resor t	-	72 0	75 6	79 4	83 3	87 5	91 9	96 5	1.0 13	1.0 64	APBN dan HLN	7.939	
						34	Peningkatan efektifitas kegiatan patroli kawasan	TNLL	12 resor t	45 7	48 0	-	48 0	52 8	55 4	58 2	61 1	64 2	674	APBN dan HLN	5.008	
						35	Pembangun konsensus/kesepakatan dengan masyarakat terkait penghentian kegiatan perambahan	TNLL	56 PKS	80	90	95	10 0	95	95	10 0	10 0	12 0	120	APBN dan HLN	995	
7		1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea	1) Terjaganya eksistensi kawasan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya sebagai sistem	Permasalahan batas kawasan (konflik batas kawasan)	Pemantapan Kawasan	36	Sosialisasi batas kawasan	TNLL	12 resor t	86 4	-	1.2 96	90 7	-	-	-	-	-	-	APBN	3.067	
						37	Pemancangan pal batas atau Penanaman Batas Hidup	TNLL	12 resor t	1.0 90	1.2 54	1.1 70	1.1 82	-	-	-	-	-	-	APBN	4.696	



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			penyangga kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat			38	Pembuatan papan peringatan/himbauan	TNLL	56 unit	216	238	249	262	275	289	303	318	334	351	APBN dan HLN	2.835
						39	Revisi/Review zonasi secara partisipatif bersama masyarakat	TNLL	1 Dokumen	-	871	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN	871
						40	Sosialisasi tentang zonasi kawasan	TNLL	12 resort	575	748	-	211	394	-	-	-	-	-	APBN dan HLN	1.928
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	3) Terwujudnya pengembangan potensi jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Potensi HHBK dan Jasling belum dimanfaatkan secara optimal yang mendukung kesejahteraan masyarakat	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	41	Penyusunan Rencana pemberdayaan	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	94	-	-	-	112	-	APBN	206	
						42	Fasilitasi Pengembangan usaha produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	TNLL	56 desa	456	456	502	577	663	763	877	1.009	1.160	1.334	APBN	7.797
						43	Inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK)	TNLL	25.230 Ha	-	150	-	200	150	200	250	-	-	-	APBN	950
						44	Pengembangan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK)	TNLL	5 jenis	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	APBN	120
						45	Sosialisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK)	TNLL	12 resort	-	-	-	278	278	278	278	-	-	-	APBN	1.112
						46	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di zona tradisional	TNLL	56 desa	-	-	595	655	687	722	758	796	835	877	APBN	5.925
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang berkelanjutan	3) Terwujudnya pengembangan potensi jasa lingkungan, wisata alam dan budaya	Potensi HHBK dan Jasling belum dimanfaatkan	Insiasi Skema Ekonomi Jasa Stock Carbon	47	Sosialisasi dan Kampanye Skema Ekonomi dari Stock Carbon bersama parapihak	TNLL	2 Lokasi	-	-	-	-	120	150	-	160	-	160	APBN	590



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		untuk kesejahteraan masyarakat	yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	kan secara optimal yang mendukung kesejahteraan masyarakat		48	Penyiapan Deplot Lokasi untuk pengukuran stock carbon	TNLL	2 lokasi	-	-	-	-	320	350	400	420	450	450	APBN	2.390
						49	Pelatihan perhitungan stock karbon	TNLL	1 kali	-	-	-	-	150	-	-	175	-	-	-	-
9		1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea	1) Terjaganya eksistensi kawasan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	Integrasi Dokumen Perencanaan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kawasan	50	Evaluasi Fungsi Kawasan Konservasi	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	458	-	-	-	-	-	-	APBN dan HLN	458
					Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Taman Nasional	51	Pemutakhiran data objek sasaran kegiatan tahunan	TNLL	10 Dokumen	99	108	114	119	125	132	138	145	152	160	APBN	1.292
						52	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek	TNLL	10 Dokumen	48	53	56	59	62	65	679	71	75	79	APBN dan HLN	1.247
10		1. Melindungi keanekaragaman hayati TNLL sebagai bagian ekosistem wallacea	2) Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL.	Belum adanya base line data untuk mendukung pengelolaan spesies dan habitat	Pembinaan spesies indikator dan habitatnya	53	Membangun Base Data tentang Potensi Kehati berbasis spasial TNLL (kajian homerange).	TNLL	1 unit	-	-	-	-	556	583	613	643	675	709	APBN dan HLN	3.779
						54	Pembuatan model konservasi spesies dan habitatnya	TNLL	1 species	-	255	281	295	309	325	341	358	376	395	APBN dan HLN	2.935
11		3. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya alam	4) Terlaksanakannya kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung pengelolaan TNLL.	Minimnya jumlah riset untuk mendukung pengelolaan	Pengembangan IPTEK	55	Pengembangan ekowisata nilai-nilai karakteristik potensi TNLL	TNLL	1 Unit	384	384	400	450	470	470	490	500	520	520	APBN dan HLN	4.588
						56	Pengembangan riset atau studi yang menunjang	TNLL	1 Unit	270	270	317	343	370	399	429	460	493	528	APBN dan HLN	3.879



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				kawasan		pendidikan masyarakat terhadap konservasi alam															
						57 Menginisiasi kerjasama terkait riset di kawasan konservasi taman nasional	TNLL	1 PKS	-	120	158	167	196	206	217	227	230	250	APBN	1.771	
						58 Riset pengembangan, budidaya dan pemantapan hasil hutan bukan kayu (HHBK).	TNLL	1 riset	487	487	536	563	591	620	651	684	718	754	APBN dan HLN	6.091	
12		2. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	2) Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL.	Permasalahan zoonosis di beberapa lokasi	Penanggulangan Dampak Sistosomiasis	59 Pemutakhiran peta penyebaran schistosoma	TNLL	1 Dokumen	-	286	-	-	-	-	-	-	-	APBN	286		
						60 Penyuluhan kesehatan terkait penyakit schistosoma	TNLL	4 Lokasi	-	162	178	187	196	206	217	227	239	251	APBN	1.863	
						61 Pembuatan MoU dengan Kementerian Kesehatan, WHO dan Dinkes Daerah	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	APBN	118	
						62 Pengadaan fasilitas pengendalian penyakit schistosoma (menuju "zero finding")	TNLL	1 Paket	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	APBN	517	
						63 Penyusunan PROTAP pencegahan penyakit schistosoma	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	395	-	-	-	-	-	-	APBN	395	
13		2. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk	3) Terwujudnya pengembangan potensi jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang dapat	Belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan	Diversifikasi dan nilai tambah produk jasalingkungan (cth:	64 Penyusunan Masterplan (Rencana Induk) Ekowisata	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	600	-	-	-	-	-	APBN	600		
						65 Pembuatan peta lokasi sumber air panas	TNLL	1 Dokumen	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	APBN	450	



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		kesejahteraan masyarakat	meningkatkan kesejahteraan masyarakat	yang dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	geothermal / pemanfaatan air/energi)	66	Promosi potensi wisata air panas	TNLL	1 Kegiatan	-	-	298	328	344	361	379	398	418	439	APBN	2.965	
						67	Pembangunan fasilitas wisata air panas	TNLL	1 Unit	-	-	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	APBN	5.000	
						68	Fasilitasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi	TNLL	1 lokasi	-	-	-	-	-	575	-	633	-	-	APBN	1.208	
						69	Survai potensi jasing air kawasan TNLL	TNLL	12 resor t	-	300	-	-	325	-	-	350	-	-	APBN	975	
						70	Pembuatan peta lokasi potensi masa air bersih	TNLL	1 tema	-	295	-	-	-	345	-	-	-	350	APBN	990	
						71	Perencana-an akses yang ramah lingkungan terhadap masa air bersih	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	197	-	-	-	-	250	-	APBN	447	
						72	Promosi potensi masa air bersih	TNLL	1 Kegiatan	-	-	298	328	344	361	379	398	558	418	APBN	3.084	
						73	Survai potensi aliran air (energi air) di kawasan TNLL	TNLL	12 resor t	-	350	-	425	-	450	-	475	-	50	APBN	1.750	
						74	Survai potensi wisata alam di kawasan TNLL	TNLL	12 resor t	450	-	-	470	-	-	480	-	-	500	APBN dan HLN	1.900	
						75	Review Site Plan Wisata	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	392	-	-	-	-	-	-	APBN	392	
						76	Fasilitasi Izin Pemanfaatan Pariwisata lam (IPPA): IUPJWA & IUPSWA	TNLL	5 izin	-	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBN	1.750
						77	Promosi dan Publikasi (Web Site dan Pameran)	TNLL	10 Kegiatan	-	-	298	328	344	361	379	398	418	439	APBN dan HLN	2.965	



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan yang dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pengelolaan Obyek Wisata Megalit	78	Pengamanan Situs Megalit	TNLL	5 resor t	300	330	347	364	382	401	421	442	464	488	APBN	3.939
						79	Promosi potensi wisata alam (Pameran & Publikasi Media).	TNLL	10 Kegiatan	226	263	298	328	344	361	379	398	418	439	APBN dan HLN	3.454
						80	Pemutakhiran potensi wisata budaya dan situs megalit disekitar kawasan TNLL.	TNLL	1 Kegiatan	-	-	786	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN
14			Jumlah staf masih belum memadai dengan kompetensi belum memadai	Peningkatan Kapasitas Pegawai	81	Pelatihan, In House Trainig, Seminar, Studi Banding, Lokakarya, Magang	TNLL , Instansi Lainnya	10 Kegiatan	-	-	230	-	-	245	-	250	-	-	APBN dan HLN	725	
					82	Peningkatan Kapasitas SDM bidang pariwisata	TNLL	4 Kegiatan	486	632	-	120	-	-	144	-	-	-	APBN dan HLN	1.382	
15			Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait	Peningkatan Kerjasama Parapihak	83	Pembuatan MoU atau Kerjasama dengan Para Pihak terkait Pengelolaan Kawasan. (Pemda, Universitas, Swasta, dll)	TNLL	1 Dokumen	-	-	-	115	-	115	-	115	-	115	APBN	460	
					84	Fasilitasi Pertemuan Forum Cagar Biosfer Lore Lindu	TNLL	7 Kegiatan	-	-	-	223	246	258	271	284	298	313	APBN	1.893	
					85	Pembuatan Media Promosi Cagar Biosfer Lore Lindu	TNLL	7 Kegiatan	-	-	-	223	246	258	271	284	298	313	APBN	1.893	



No	VISI	MISI	TUJUAN PENGELOLAAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN/ AKSI	LOK KEG	TAR GET	KEBUTUHAN DANA INDIKATIF TAHUN KE										SUMBER PENDANAAN	TOTAL ESTIMASI	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
16						86	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan jalan wisata patroli /jalan setapak akses budaya Doda-Lelio.	TNLL	1 PKS	-	-	369	-	-	350	-	403	-	-	APBN	1.122
						87	Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan jalan Kamarora-Dongi-Dongi dan Dongi-Dongi –Sedoa dan Torire-Bariri sebagai jalan umum/jalan wisata	TNLL	1 PKS	-	-	498	-	-	500	-	530	-	-	APBN	1.528
						88	Fasilitasi kerjasama pengelolaan jaringan listrik Bariri-Torire untuk menunjang objek wisata situs megalit.	TNLL	1 PKS	-	-	-	680	240	-	-	-	-	-	APBN	920
						89	Fasilitasi Pengadaan fasilitas obyek wisata budaya dan situs megalit	TNLL	1 Unit	-	-	-	200	-	-	400	-	-	600	APBN	1.200
						90	Fasilitasi Pembangunan fasilitas Pengelolaan Kawasan.	TNLL	12 resort	-	-	-	300	500	1200	1300	800	900	900		5.900

## V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

# RPJP

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
TAHUN 2016-2025



Hutan pengunan atas



### Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile  
(0451) 457623 – 429270



## V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Empat aspek pokok yang sekaligus menjadi pilar utama dalam suatu pengelolaan atau manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) yang sering disingkat sebagai *POAC*. Pemantauan dan evaluasi bersama sama dengan pelaporan merupakan bentuk konkrit dari aspek pengendalian (*controlling*). Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tindakan manajerial yang dilaksanakan dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja suatu institusi. Untuk instansi pemerintah kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sekaligus bersama dengan kegiatan pelaporan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari tingkatan satuan kerja, unit organisasi dan tingkat kementerian/lembaga.

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu selaku satuan kerja pada Ditjen Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu sebagai bagian dalam penyelenggaraan SAKIP pada entitas akuntabilitas pada tingkat satuan kerja. Dengan demikian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu pengelolaan, dengan membandingkan antara target dan realisasi dalam pencapaian tujuan pengelolaan.



## A. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Pemantauan menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh sebuah instansi untuk memberikan keyakinan kepada pengelola bahwa pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan ataupun ditetapkan. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra. Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala.

## B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup:

1. Pemantauan dan evaluasi oleh internal Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain; dan
3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat.

Berdasarkan indikator keberhasilan program yang telah ditetapkan, efektifitas program dan kegiatan pengelolaan dapat diukur dan dievaluasi dengan membandingkan antara target capaian dan realisasi capaian



target. Dengan mengetahui efektifitas capaian target-target pengelolaan, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dievaluasi guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target kemudian dilakukan tindakan manajerial yang mendorong peningkatan terhadap pencapaian target-target pengelolaan taman nasional.

Secara makro, keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu akan berkontribusi pada optimalisasi fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi dalam hal sebagai berikut:

1. Sebagai kawasan penyangga sistem kehidupan, baik lokal, regional maupun global;
2. Sebagai benteng terakhir pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
3. Sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan (lestari) baik manfaat langsung dari potensi sumberdaya alam TNLL maupun kondisi ekosistemnya.

Hasil (*outcome*) yang diharapkan dari keberhasilan pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu akan nampak dari beberapa indikator keberhasilan, antara lain:

1. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan secara komprehensif dan *time series* guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan yang berbasis data potensi kawasan dan didukung dengan sistem pengelolaan yang mantap;
2. Meningkatnya pengelolaan kawasan yang didukung oleh seluruh *stakeholder* terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pihak terkait. Dalam hal ini secara kuantitatif peningkatan pengelolaan dapat dilihat dari peningkatan indeks keberlanjutan berdasarkan kriteria dan indikator kondisi yang diinginkan sebagaimana dijelaskan dalam bab empat; dan



3. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang ada disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan taman nasional dari berbagai gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan.

### **C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PENGELOLAAN TNLL**

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan TNLL ditujukan untuk memantau dan menilai aspek-aspek keberlanjutan pengelolaan dan efektivitas pemanfaatan kawasan beserta potensi sumberdaya alam kawasan TNLL yang terintegrasi dengan enam prioritas kegiatan pengelolaan yang menjadi kebijakan BBTNLL. Pemantauan dan evaluasi ini dapat dipilah kedalam 6 (enam) komponen, yaitu:

1. Komponen Keandalan Habitat; pemantauan dan evaluasi komponen keandalan habitat ini meliputi 12 (dua belas) indikator antara lain:
  - a. Konektivitas habitat;
  - b. Heterogenitas habitat;
  - c. Keaslian keragaman habitat terjaga;
  - d. Kerusakan habitat;
  - e. Pengelolaan sumber daya/habitat/spesies;
  - f. Pencemaran air;
  - g. Muatan sedimen;
  - h. Level Oxygen;
  - i. Suplai air;
  - j. Gangguan fisik terhadap habitat (konstruksi, alat tangkap, kebisingan aktifitas);
  - k. Kerusakan karena bencana alam; dan
  - l. Resiliensi desain (*size, altitude, NSaxis, lithology, dynamics, multiple catchments*).
2. Komponen Kesehatan Spesies; pemantauan dan evaluasi komponen kesehatan spesies ini meliputi 10 (sepuluh) indikator antara lain:
  - a. Kesehatan spesies target;



- b. Kesehatan species indikator (vertebrata);
  - c. Kesehatan species indikator (invertebrata/pohon);
  - d. Keragaman species terjaga;
  - e. Spesies karnivor tropis tingkat tinggi masih ada;
  - f. Resiliensi IAS;
  - g. Keberhasilan *breeding species target*;
  - h. Spesies kunci baru di site;
  - i. (Manfaat ekonomi) pengambilan species (legal dan illegal); dan
  - j. Mortalitas/ben-cana yang dialami species kunci (kebakaran, kekeringan, banjir, penyakit).
3. Komponen Lingkungan, Sosial, Kerangka Hukum (LSKH); pemantauan dan evaluasi komponen LSKH ini meliputi 10 (sepuluh) indikator antara lain:
- a. Batas-batas dan zonasi;
  - b. Kerangka legal/hukum;
  - c. Peraturan kawasan konservasi;
  - d. Desain Kawasan konservasi;
  - e. Dampak pariwisata;
  - f. Tekanan (sumberdaya) manusia;
  - g. Ancaman atau tekanan eksternal karena pembangunan (yang ada atau sedang direncanakan);
  - h. Hubungan dengan masyarakat (adat);
  - i. Keuntungan ekonomi; dan
  - j. Kondisi nilai-nilai.
4. Komponen Pengelolaan Wisata Alam, Budaya dan Situs Megalit mencakup tujuh indikator sebagai berikut:
- a. Rencana Pengembangan Wisata (*site plan*)
  - b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung wisata
  - c. Jumlah kunjungan wisata dan peningkatan PNBK;
  - d. Kelestarian obyek wisata dan situs megalit di Taman Nasional Lore Lindu;



- e. Kegiatan promosi dan publikasi;
  - f. Kemampuan SDM dalam pengelolaan wisata; dan
  - g. Pemanfaatan Jasling Air (Energi Air, Massa Air), Panas Bumi.
5. Komponen Kelembagaan, Riset dan Sumberdaya Manusia (KRSM); pemantauan dan evaluasi komponen KRSM ini meliputi 7 (tujuh) indikator antara lain:
- a. Rencana pengelolaan;
  - b. Rencana pengelolaan jangka pendek (RPJPn);
  - c. Riset;
  - d. Ketersediaan staf;
  - e. Kualitas SDM;
  - f. Hubungan dengan Pemerintah daerah dan swasta; dan
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu terkait ada tidaknya komunikasi dan kerja sama, cara pelaksanaan monev, ada tidaknya umpan balik pada pengelolaan, ada tidaknya pengaruh monev terhadap unsur 'memicu' pelaksanaan pengelolaan adaptif.
6. Komponen Keberlanjutan Anggaran dan Fasilitas (KAF); pemantauan dan evaluasi komponen KAF ini meliputi 7 (tujuh) indikator antara lain:
- a. Ketersediaan anggaran saat ini;
  - b. Kepastian anggaran;
  - c. Pengelolaan anggaran;
  - d. Perlengkapan;
  - e. Pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas;
  - f. Fasilitas pengunjung; dan PNPB dan pungutan lain.



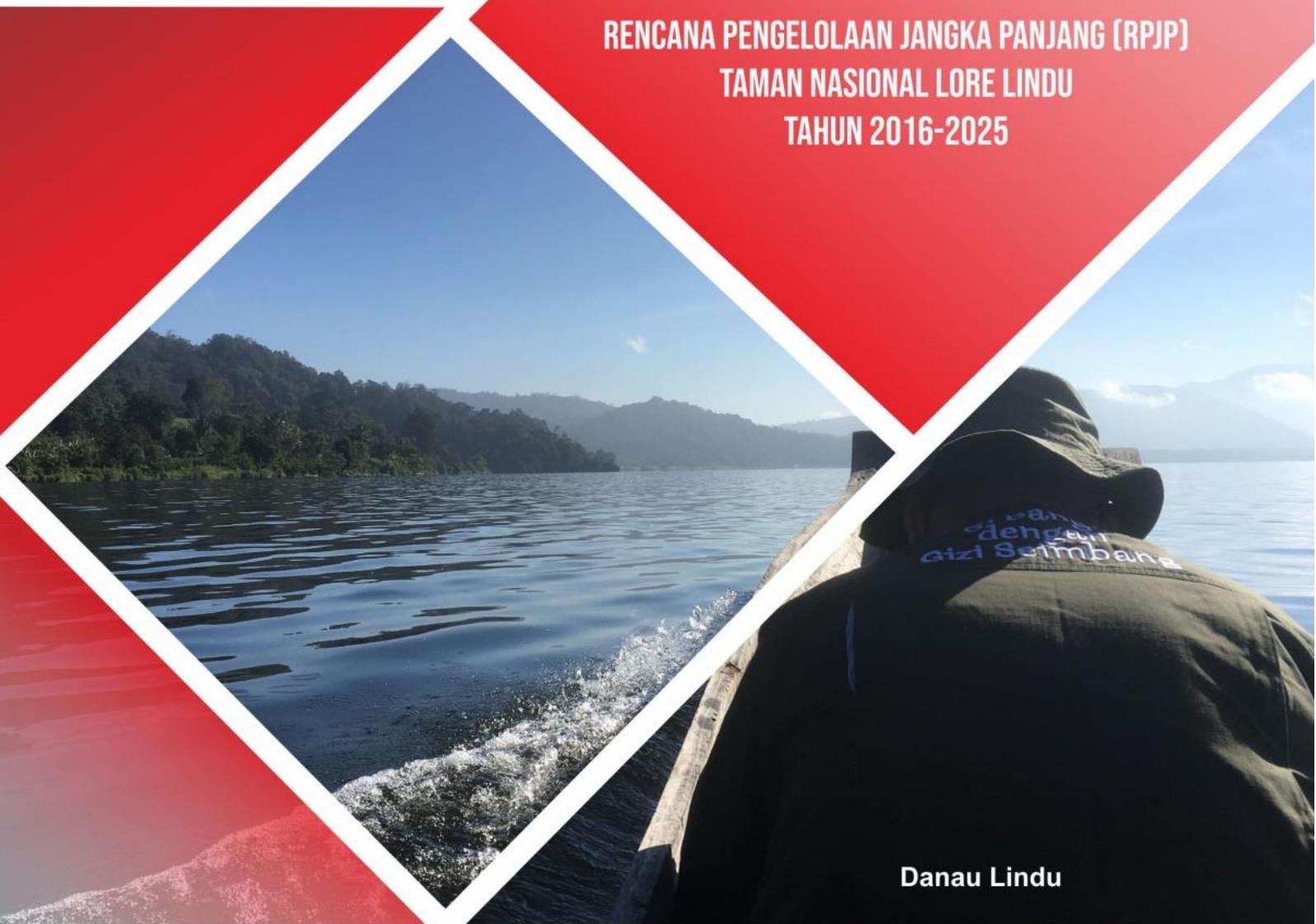
**Tabel 12.** Hasil Evaluasi Tujuan Pengelolaan pada Tahun ke-5

No	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan Pengelolaan	Progres Pencapaian	Pihak yang Terlibat	Status Keberhasilan	Kendala yang dihadapi	Tindak lanjut
1	Terjaganya eksistensi kawasan TNLL beserta segala bentuk penyusun ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	Nilai METT TNLL di atas 70 %	Pada tahun 2019 nilai METT TNLL = 74%	UPT, FP III, EPASS, perguruan tinggi, masyarakat	Tercapai		
2	Menurunnya tekanan dan ancaman terhadap sumber daya alam TNLL	Laju deforestasi TNLL di bawah 0,5% / tahun	Pada tahun 2019, nilai open area TNLL meningkat 4,2% dari baseline	UPT, FP III, EPASS, perguruan tinggi, masyarakat	Tidak tercapai	Maraknya aktivitas PETI, kebutuhan lahan makin meningkat	Kerja sama multi pihak dalam penanganan PETI, Kemitraan Konservasi
3	Terwujudnya Pengembangan potensi jasa lingkungan, wisata alam dan budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Jumlah kunjungan wisata meningkat 20% dari baseline (Tahun 2016)	Kunjungan wisata pada tahun 2020 naik 37 %	UPT, FP III, EPASS, masyarakat	Tercapai		
4	Terlaksanakannya kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung pengelolaan TNLL	Jumlah penelitian di TNLL meningkat 10% dari <i>base line</i> (Tahun 2016)	Jumlah penelitian di TNLL Tahun 2020 turun 44,4 %	UPT, perguruan tinggi, swasta	Tidak tercapai	Ditutupnya kawasan TNLL untuk tujuan penelitian akibat covid 19 dan terorisme	

**LAMPIRAN**

# RPJP

**RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
TAHUN 2016-2025**



**Danau Lindu**



## **Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu**

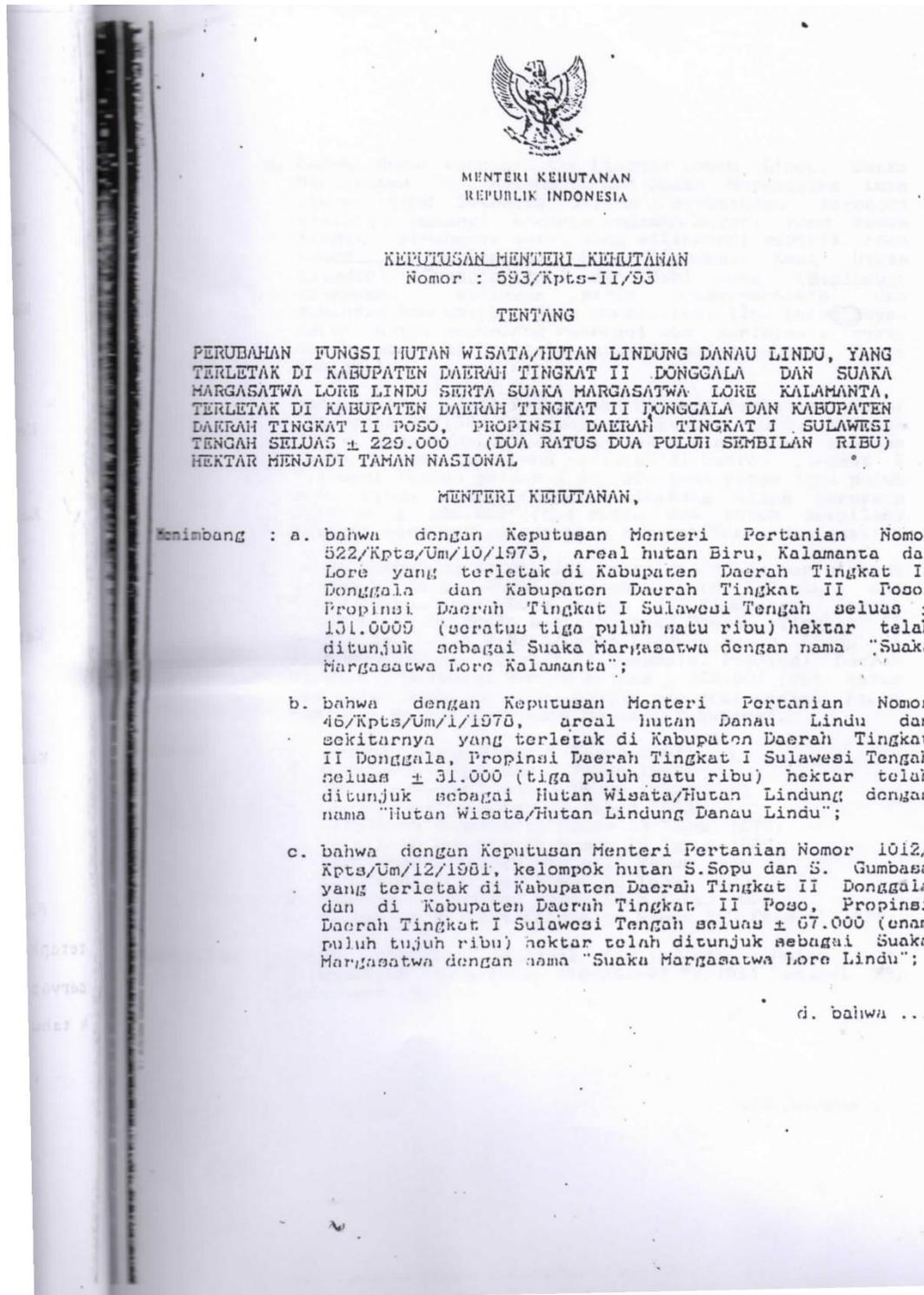
Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile  
(0451) 457623 – 429270



# LAMPIRAN



Lampiran 1. SK Penunjukan Taman Nasional Lore Lindu





- 2 -

d. bahwa Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu, Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dan Suaka Margasatwa Lore Lindu yang letaknya saling berbatasan tersebut memiliki potensi keaneka ragaman hayati yang cukup tinggi, khususnya satwa yang dilindungi seperti Anoa (*Anoa deorossioides*), Rusa (*Cervus*), Kera hitam Sulawesi (*Cynopithecus*) dan Babi rusa (*Babirusa babirusa*) sehingga perlu dipertahankan dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan serta untuk menunjang rekreasi dan pariwisata serta telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai Taman Nasional;

e. bahwa dengan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 tanggal 4 Oktober 1982, kawasan Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu dan kawasan Suaka Margasatwa yang terletak di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas ± 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu) hektar [setelah dihitung ulang ternyata luasnya ± 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu) hektar] tersebut, dinyatakan sebagai Taman Nasional;

f. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk mengubah fungsi Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dan Suaka Margasatwa Lore Lindu di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Kabupaten Daerah Tingkat II Poso, dan Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas ± 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu) hektar tersebut menjadi Taman Nasional dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo  
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990;

perhatikan :

Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 2786/DJ-VI/TN/1991 tanggal 25 September 1991.

MEMUTUSAKAN :



- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengubah fungsi Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Suaka Margasatwa Lore Kulamanta dan Suaka Margasatwa Lore Lindu yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Kabupaten Daerah Tingkat II Poso, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, seluas ± 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu) hektar menjadi Taman Nasional dengan nama "TAMAN NASIONAL LORE LINDU".
- SEDUA : Batas sementara Taman Nasional Lore Lindu tersebut di atas peta adalah sebagaimana terlukis pada bis ung pada peta lampiran Keputusan ini, sedang batas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah dilaksanakannya penataan batas di lapangan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk mengatur pelaksanaan batas Taman Nasional Lore Lindu tersebut bersama Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Panitia Tata Batas Hutan Daerah Tingkat II Poso.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta.  
Salinan ditandatangani dengan aslinya.  
Kepala Biro Teknik dan Organisasi,

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 1993

MENTERI KEHUTANAN,

  
SUNDIYA ANJASANTO SH.

t t d

Salinan Keputusan ini  
dipembagikan kepada Yth.:

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO.

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.
2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
3. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri
5. Sdr. Menteri Pertanian
6. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
9. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
11. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
12. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala.
13. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso.
14. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hutan VI.



Lampiran 2. Keputusan Menteri Kehutanan RI No.: SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.869/Menhut-II/2014

**TENTANG**

**KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-VII/1987 tanggal 25 Februari 1987, telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah seluas  $\pm$  5.176.672 (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah seluas  $\pm$  4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar, hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah dengan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  42.788 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa ...



- 2 -

- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.579/Menhut-II/2013 tanggal 26 September 2013, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas  $\pm$  15.312 (lima belas ribu tiga ratus dua belas) hektar, di Provinsi Sulawesi Tengah, yang berasal dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas  $\pm$  5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar dan Kawasan Hutan Lindung seluas  $\pm$  9.802 (sembilan ribu delapan ratus dua) hektar;
- e. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 menyampaikan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Pimpinan DPR RI memutuskan meneruskan surat Pimpinan Komisi IV DPR RI Nomor 122/Kom IV/DPR RI/IX/2014 tanggal 22 September 2014, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah dilakukan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;
- g. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4. Undang-Undang ...



- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

18. Peraturan ...



- 4 -

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 757/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas ± 4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 8.409 (delapan ribu empat ratus sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 8.409 (delapan ribu empat ratus sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah;

Memperhatikan : ...



- 5 -

- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 650/335/Dis PU tanggal 6 Mei 2010, Nomor 600/164/PUD tanggal 27 September 2011, Nomor 522/220/DISHUTDA tanggal 29 Nopember 2011, Nomor 522/271/ DISHUTDA tanggal 23 Desember 2011, Nomor 522/305/ DISHUTDA tanggal 3 Mei 2012, Nomor 522/429/ DISHUTDA tanggal 26 Juni 2012, dan Nomor 650/632/DISHUTDA tanggal 31 Desember 2013;
2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**KESATU** : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 4.274.687 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 988.493 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar, terdiri dari:
  1. Daratan, seluas ± 648.374 (enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar;
  2. Perairan, seluas ± 340.119 (tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan belas) hektar;
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.276.087 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh tujuh) hektar;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 1.390.971 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar;
- d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 401.814 (empat ratus satu ribu delapan ratus empat belas) hektar;
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 217.322 (dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar.

**KEDUA** : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

**KETIGA** : ...



- 6 -

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas ± 4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 94.759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 8.409 (delapan ribu empat ratus sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 91 (sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/Menhut-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2014

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ZULKIFLI HASAN**



**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**KRISNA RYA**

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.
11. Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu.



### Lampiran 3. Surat RPJP Taman Nasional Lore Lindu



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU**  
Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111 Telepon/Faksimile (0451) 457623 – 429270

Nomor : S.128/IV-T.05/Tk/12/2020

23 Desember 2020

Lampiran: 1 Berkas

Perihal : Revisi Dokumen RPJP Taman Nasional Lore Lindu

Kepada Yth.

Direktur Jenderal KSDAE

di -

Jakarta

Menyusuli surat kami Nomor S. 211/5-T.5/TK/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Dukungan Revisi RPJP Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen RPJP TNLL Tahun 2016 – 2025 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK. 338/KSDAE/Set/KSA.1/9/2016 tanggal 30 September 2016.
2. Sejak penetapan dokumen tersebut sampai dengan tahun 2020, BBTNLL telah menyusun beberapa dokumen perencanaan pengelolaan antara lain:

No	Dokumen	Tahun Pengesahan
1	Masterplan (Rencana Induk) Ekowisata dan DED Pilot Ekowisata TNLL	2018
2	Zonasi TNLL	2018
3	Rencana Pemulihan Ekosistem Tahun 2020 - 2024	2020
4	Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TNLL Tahun 2021 - 2025	2020

3. Dalam rangka penyesuaian dan integrasi seluruh dokumen perencanaan pengelolaan TNLL, kami melakukan evaluasi dokumen RPJP TNLL sebagaimana terlampir.
4. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilakukan Revisi Parsial Dokumen RPJP TNLL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584) dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem



Nomor: P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

5. Selanjutnya untuk pelaksanaan revisi RPJP tersebut, kami mohon arahan dari Bapak Dirjen dan pendampingan Direktorat Teknis.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Balai Besar,  
  
Ir. Jusman  
NIP. 19641231 199303 1 010

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Direktur Kawasan Konservasi
3. Direktur PIKA



Lampiran surat Kepala Balai Besar  
Nomor 3.1284/W-T.05/fk/12/2020  
Tanggal : 23 Desember 2020

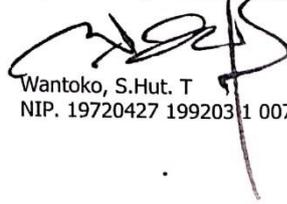
Matriks Hasil Evaluasi Dokumen RPJP TNLL Tahun 2016 – 2025

No	Hal	Sesuai	Tidak	Keterangan
1	Halaman Judul		✓	Ditambahkan Provinsi "Sulawesi Tengah"
2	Lembar Pengesahan		✓	Layout menyesuaikan Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan
3	Lembar Rekomendasi		✓	Perlu dibuat lembar rekomendasi secara singkat dan jelas
4	Peta Situasi		✓	Perlu penambahan peta situasi TNLL
5	Ringkasan Eksekutif		✓	Perlu dilengkapi dengan ringkasan eksekutif
6	Kata pengantar	✓		Disesuaikan dengan kondisi terkini
7	Daftar Isi	✓		Disesuaikan dengan kondisi terkini
8	Daftar tabel	✓		Disesuaikan dengan kondisi terkini
9	Daftar lampiran	✓		Disesuaikan dengan kondisi terkini
10	I. Pendahuluan		✓	- Perlu ditambahkan informasi terkait: letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi dan budaya; kondisi saat ini yang memuat antara lain kondisi dan status terkini nilai penting kawasan dan isu-isu strategis pengelolaan yang ada; serta kondisi yang diinginkan mengenai kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang diwujudkan melalui pengelolaan 10 tahun ke depan - Pada dokumen RPJP 2016-2025, point 1 di atas pada umumnya telah tertuang dalam Bab 2 dan 3.
11	II. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan		✓	Perlu penyesuaian dengan visi dan misi Presiden RI serta nilai penting kawasan yang akan dicapai dalam rentang waktu RPJP ini sampai dengan tahun 2025
12	III. Zona		✓	Mendeskripsikan secara singkat zonasi TNLL hasil revisi zonasi TNLL Nomor: SK.456/KSDAE/SET/KSA.0/12/2018, Tanggal 31 Desember 2020 Tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Sigi Dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
13	IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI		✓	Perlu menyesuaikan dengan dokumen lain yang telah disusun seperti Rencana Pemulihan Ekosistem, Rencana Pemberdayaan Masyarakat, Masterplan Ekowisata, Rencana Pelaksanaan Program Perjanjian Kerja Sama
14	V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	✓		



No	Hal	Sesuai	Tidak	Keterangan
15	VI. LAMPIRAN			
	SK Penunjukan kawasan	√		
	Berita Acara Konsultasi Publik	√		
	Surat permohonan rekomendasi Bappeda dan atau Rekomendasi Bappeda	√		Dalam hal pengajuan rekomendasi tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah, Kepala Unit Pengelola dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan disampaikan, dapat mengajukan dokumen rencana Pengelolaan kepada Direktur Jenderal KSDAE untuk dilakukan penilaian dan pengesahan (Pedoman Hal. 44)
	Peta batas kawasan dengan toponimi		√	Disesuaikan dengan SK. Menteri Kehutanan No. 869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah
	Peta nilai penting kawasan	√		Update dengan data-data terbaru
	Peta zonasi/ blok pengelolaan	√		Menyesuaikan dengan revisi zonasi TNLL Nomor: SK.456/KSDAE/SET/KSA.0/12/2018, Tanggal 31 Desember 2020 Tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Sigi Dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
	Peta tutupan lahan	√		Update dengan data terbaru (tutupan Lahan Tahun 2019)
	Peta kerawanan kawasan	√		Update dengan data-data terbaru
	Peta daerah penyangga	√		Perlu menyesuaikan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Nomor: SK. 81/IV-T.5/TK/11/2020 Tentang Revisi Penetapan Desa Penyangga Di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu
	Peta sarana prasarana	√		Update dengan data-data terbaru
	Peta Daerah Aliran Sungai			√ Melampirkan peta DAS

Kepala Bidang Teknis Konservasi

  
Wantoko, S.Hut. T  
NIP. 19720427 199203 1 007



## Lampiran 4. Evaluasi Dokumen RPJP



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI**

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Telp. (021) 5720229, JAKARTA

Nomor : S. 23 /KK/PPKK.1/KSA.1/1/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Evaluasi Dokumen RPJP

20 Januari 2021

**Yth. Kepala Balai Besar**  
**Taman Nasional Lore Lindu**  
**di-**  
**Palu**

Sehubungan Surat Saudara Nomor: S.1284/IV-T.05/Tk/12/2020, tanggal 23 Desember 2020, perihal Revisi Dokumen RPJP Taman Nasional Lore Lindu yang ditujukan kepada Direktur Jenderal KSDAE dan kami menerima tembusannya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa:
  - Taman Nasional Lore Lindu telah mempunyai Dokumen RPJP yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dengan Periode 2016 – 2025.
  - Sejak pengesahan Dokumen RPJP TN Lore Lindu tersebut, sampai dengan tahun 2020 telah terdapat empat dokumen perencanaan pengelolaan, yaitu: Masterplan Ekowisata dan DED Pilot Ekowisata; Penataan Zonasi; Rencana Pemulihan Ekosistem; dan Rencana Pemberdayaan Masyarakat.
  - Dalam rangka penyesuaian dan integrasi seluruh dokumen perencanaan tersebut, TN Lore Lindu melakukan evaluasi terhadap Dokumen RPJP dengan rekomendasi **direvisi parsial**.
- Berdasarkan hasil telaah kami, pelaksanaan evaluasi RPJP TN Lore Lindu Periode 2016 -2025 sudah sesuai dan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA, KPA, dan Taman Buru.
- Berkenaan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut dengan melaksanakan **Revisi Parsial** terhadap RPJP TN Lore Lindu Periode 2016 -2025.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur,  
Ratna Hendratmoko, S.H., M.Hum.  
NIP. 19741228 200212 1 008

Tembusan:

- Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE; dan
- Plt. Direktur Kawasan Konservasi (sebagai laporan).

D:\Subdit\_PP0K1\_new\Surat\Surat Dir KK\_TN\_LL\_evaluasi RPJP\_26-Jan-2021.docx



Lampiran 5. SK Tim Kerja Penyusunan Revisi Dokumen RPJP TNLL



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
NOMOR : SK. 338/KSDA/E/SET/KSA.1/9/2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL LORE LINDU,  
KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
PERIODE 2016-2025

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 593/Kpts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993, telah dirubah fungsi Hutan Wisata/Lindung Danau Lindu, Suaka Margasatwa Lore Lindu dan Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, menjadi Taman Nasional Lore Lindu seluas 229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu) hektar;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 464/Kpts-II/99 tanggal 23 Juni 1999, telah ditetapkan kelompok hutan Lore Lindu sebagai kawasan hutan tetap Taman Nasional seluas 217.991,18 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu, delapan belas perseratus) hektar;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa perencanaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dikelola dengan rencana pengelolaan dan disusun oleh unit pengelola dan rencana pengelolaan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Teknis, rencana pengelolaan jangka panjang dilakukan pengesahan oleh Direktur Jenderal;
  - e. bahwa Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sesuai surat nomor S.794/IV-T.33/TU-Ren/2016 tanggal 12 Juli 2016, menyampaikan permohonan pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu kepada Direktur Kawasan Konservasi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Peraturan....



2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL LORE LINDU, KABUPATEN SIGI DAN KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PERIODE 2016-2025.
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016-2025.
- KEDUA** : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu untuk mempedomani dan menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Nasional Lore Lindu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 30 September 2016  
DIREKTUR JENDERAL,  
  
Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc.  
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.



## Lampiran 6. Berita Acara Konsultasi Publik

### BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL 2016-2025

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Hotel Sutan Raja Palu, telah dilaksanakan pembahasan/konsultasi publik Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Lore Lindu Tahun 2016-2025 yang dihadiri oleh :

1. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi
6. Professional Asistant Staff dari Akademisi Universitas Tadulako

Berdasarkan hasil presentasi dan diskusi telah diperoleh saran dan masukan yang menjadi dasar untuk penyempurnaan dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu oleh Tim Penyusun yang tertuang dalam Notulen Rapat Pembahasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan Draft Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengesahan Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Lore Lindu Periode Tahun 2016-2025.

### PERWAKILAN PESERTA KONSULTASI PUBLIK DRAFT RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL LORE LINDU PERIODE TAHUN 2015-2024

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Ir. Ahmad Yani	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	
2.	Mappatoba Andi, SH, M.Eng	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
3.	Carnoto, S.Hut.T, MM	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	
4.	Ir. Sunandar	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi	
5.	Bambang A. S., SP, M.Si	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi (Kabid Kehutanan)	
6.	Ir. Ahmad Rizal M.APP, Sc. Ph.D	Professional Asistant Staff	



## Lampiran 7. Surat Permohonan Rekomendasi Bappeda



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU**  
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 53, Palu, 94111, Sulawesi Tengah, Telp./Fax. (0451) 457623

Nomor : S.520/IV-T.5/TK-P3/4/2021 22 April 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Rekomendasi Terkait dengan Revisi  
Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP)  
Taman Nasional Lore Lindu 2016-2025

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sulteng

Di Palu

Kawasan Taman Nasional Lore Lindu memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan Kota Palu sehingga perlu dikelola dengan sistematis dan komprehensif. Untuk itu pada tahun 2016, telah disusun Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TNLL tahun 2016-2025 yang mengacu pada kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya dengan hormat kami informasikan beberapa hal hal sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya terkait kemitraan konservasi bersama masyarakat di zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor:P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
2. Beberapa dokumen tematik pengelolaan kawasan yang telah disusun terdiri dari:
  - a. Dokumen Zonasi TNLL pada tahun 2018
  - b. Master Plan Ekowisata TNLL pada tahun 2018
  - c. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 2021-2025 pada tahun 2020
  - d. Rencana Pemulihan Ekosistem TNLL 2020-2024 pada tahun 2020
3. Perlu dilakukan integrasi dan penyesuaian Dokumen RPJP TNLL dengan dokumen tematik pengelolaan kawasan serta menyelaraskan dengan kondisi dan dinamika pengelolaan melalui revisi Parsial Dokumen RPJP TNLL Tahun 2016 – 2025.
4. Berkenaan dengan poin-poin di atas guna memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 Tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan rekomendasi atas Revisi Dokumen RPJP TNLL Tahun 2016 – 2025. (draft revisi terlampir).

Demikian, untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.



Kepala Balai Besar,

Ir. Jusman

NIP. 19641231 199303 1 010

Tembusan:

1. Direktur Jenderal KSDAE
2. Sekditjen KSDAE Kementerian LHK
3. Direktur PIKA Ditjen KSDAE
4. Direktur KK Ditjen KSDAE

















## Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jalan Prof. M. Yamin No.53 Palu-Sulawesi Tengah 94111  
Telepon/Faksimile (0451) 457623 – 429270

DIPA 2021